



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan Rahmat-Nya maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu cara pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan atau dirumuskan dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kedepan. Tidak lupa kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga

maupun dukungan lainnya dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2025.

Akhir kata semoga Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Benteng Selayar, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum BPKPD	4
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD	5
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	50
1.5. Inovasi	54
1.6. Penghargaan	56
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENERINTAHAN	66
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	66
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	67
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	68

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	69
3.1. Dasar Hukum	69
3.1. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan	69
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan :	
1. Target Kinerja	
2. Realisasi	
3.4. Permasalahan dan Kendala	
3.5. Saran dan Tindak Lanjut	
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah perlu melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan.

Salah satu bentuk laporan tersebut adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD menjadi media bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian kinerja, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan LPPD memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah harus menyusun laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan hasil yang telah dicapai.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. LPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

LPPD disusun berdasarkan data dan informasi yang terkumpul dari berbagai sektor pemerintahan, baik yang bersifat administratif maupun hasil pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya LPPD, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disusun dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Amanat Undang-Undang

Penyusunan LPPD didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

LPPD disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah.

3. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah

Laporan ini menjadi alat evaluasi terhadap capaian kinerja daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan adanya LPPD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan serta kendala dalam pelayanan publik, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam periode berikutnya.

5. Bahan Pertimbangan Kebijakan

LPPD digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, termasuk dalam pemberian insentif atau sanksi.

1.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah OPD bertipe A dan beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Telepon (0414)21027 Fax (0414)21737, Email: bpkpdseleyar@gmail.com. Website: <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id/>



Gambar 1 : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

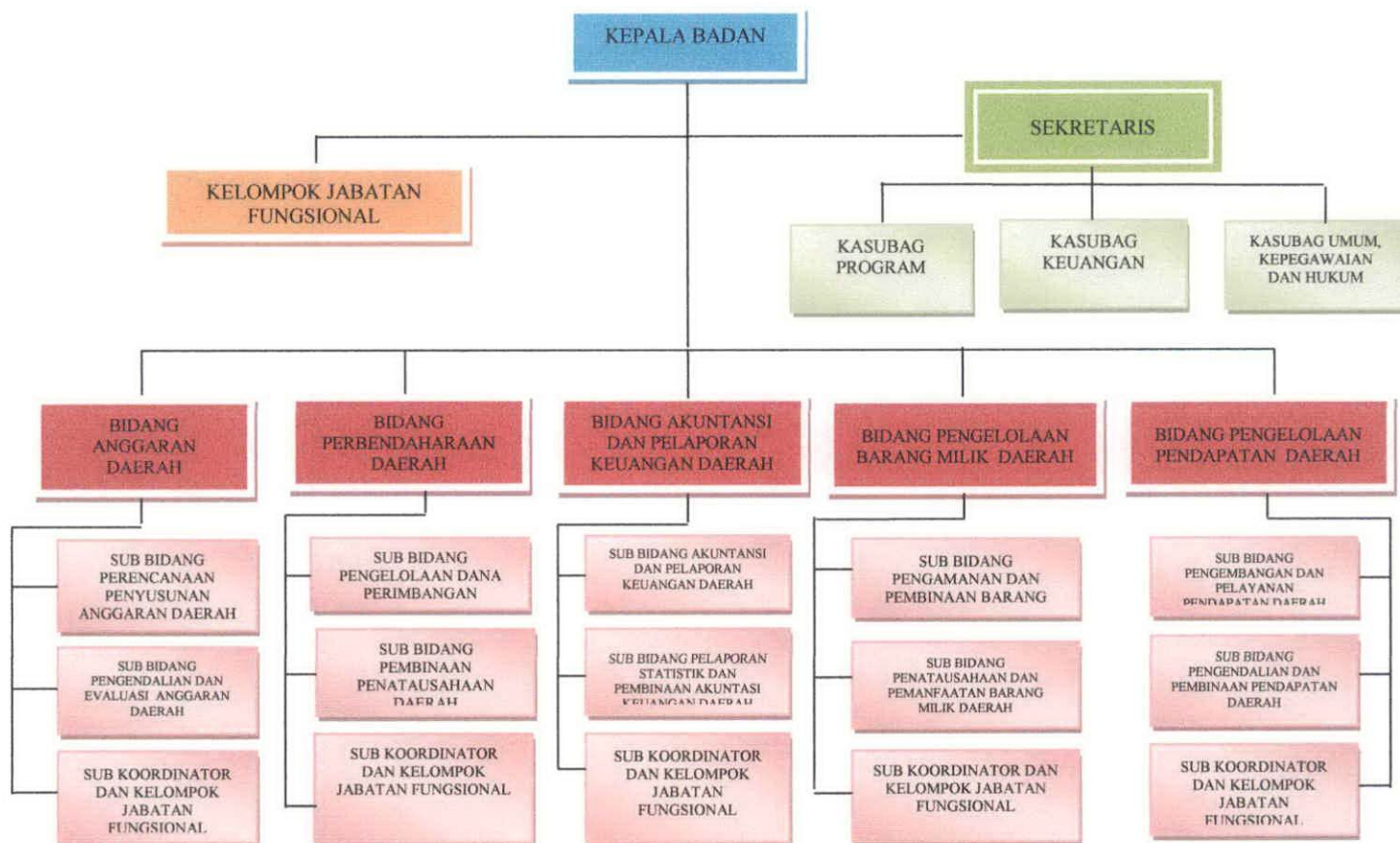
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah terdiri dari :

- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Struktur Organisasi BPKPD



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;

- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;

- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- j. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
- n. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah;
- p. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

- q. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Sub Bagian Keuangan dan memiliki fungsi sebahai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

օգնեցան ինձ:

Եստե՛րք, զո՞ւ խորհե՛ք զո՞ւ Եստե՛րք, զո՞ւ խորհե՛ք
 օ՛ր առաջա՛յն քո՞տը ինչ զո՞ւ խորհե՛ք զո՞ւ խորհե՛ք
 Եստե՛ք:

Ա՛յ Եստե՛րք, Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք:

Ես առաջա՛յն խորհե՛մք ինձ Եստե՛ք զո՞ւ խորհե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք:

Եստե՛ք, Եստե՛ք Եստե՛ք:

Կ՛առաջա՛յն զո՞ւ առաջա՛յն խորհե՛ք խորհե՛ք խորհե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք:

Ի՛նչ առաջա՛յն զո՞ւ առաջա՛յն Եստե՛ք զո՞ւ խորհե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Ի՛նչ առաջա՛յն զո՞ւ առաջա՛յն զո՞ւ խորհե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Ի՛նչ առաջա՛յն զո՞ւ առաջա՛յն զո՞ւ խորհե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Կ՛առաջա՛յն զո՞ւ առաջա՛յն զո՞ւ խորհե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք Եստե՛ք
 Եստե՛ք Եստե՛ք:

- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan di kelola oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyediakan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi badan;
- i. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- j. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun dinas;
- k. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran badan;
- m. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum di kelola oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum, kepegawaian dan hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup badan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup badan;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup badan;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup badan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala subbagian umum, kepegawaian dan hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG ANGGARAN DAERAH

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah dan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah.

Kepala Bidang Anggaran Daerah juga mempunyai fungsi dalam :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Anggaran Daerah juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau rencana kerja anggaran/perubahan/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- h. melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- i. melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- k. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- l. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- m. melaksanakan penyediaan anggaran kas;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang anggaran;

- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah

- Urain Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- g. mengoordinasikan dan menyusun perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- m. Menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- n. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- o. menganalisis investasi Pemerintah Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan penyusunan anggaran daerah ;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - g. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- h. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan menyusun regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 - g. melakukan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten;
 - h. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
 - i. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
 - j. melakukan pengelolaan dana darurat mendesak;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang administrasi dan pembinaan anggaran daerah;

- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pegelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

7. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- h. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- i. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- j. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- k. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, pemberian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- o. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban surat pertanggungjawaban;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan Daerah;

- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengelolaan Dana Perimbangan

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menatausahakan pembiayaan daerah;

- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. melakukan perekaman data gaji aparatur sipil negara dan mencetak daftar gaji untuk perangkat daerah;
- i. meneliti kelengkapan dokumen pencairan gaji yang diajukan oleh perangkat daerah;
- j. menerbitkan dokumen surat perintah pencairan dana gaji;
- k. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana perimbangan;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - g. mengoordinasikan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
 - h. melakukan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
 - i. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.

10. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- i. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- j. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- k. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah;
- l. menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- n. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;

- p. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- r. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
- h. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;\
- i. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah;
- l. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- m. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- n. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;

2. Subbidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten;
 - h. melakukan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
 - j. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;

- k. melakukan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah Pemerintah Kabupaten;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelaporan, statistik, dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah.

13. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasar kan jenis dan tipe barang;

- g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik dan administrasi barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari perangkat daerah;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pengamanan barang milik daerah;
 - g. penilaian barang milik daerah;
 - h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 - i. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik;
 - j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pembinaan barang milik daerah;

- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. **Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- g. melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- i. melakukan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah serta Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah.

- Fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan perumusan dan perencanaan penetapan pendapatan daerah;
- g. merumuskan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - g. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - h. melakukan penagihan pajak daerah;
 - i. mengoordinasikan penyelesaian keberatan pajak daerah;

- j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 50 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan golongan ruang

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	5
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
7.	Penata Muda (III/a)	12
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama/IX	2
JUMLAH		50

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	S2	9	10
2.	S1	13	7
3.	D III	1	1
4.	SMA	1	8
JUMLAH		24	26

c. Berdasarkan data jabatan struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris Badan	1
3.	Kepala Subbagian Program	1
4.	Kepala Subbagian Keuangan	1
5.	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	1
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1
7.	Kepala Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah	1
8.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah	1
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1
10.	Kepala Subbidang Pengelolaan Dana Perimbangan	1
11.	Kepala Subbidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	1

12.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1
13.	Kepala Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah	1
14.	Kepala Subbidang Pelaporan Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	1
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah	1
16.	Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah	1
17.	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
19.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	1
20.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	1
JUMLAH		20

d. Berdasarkan data jabatan fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	5
JUMLAH		5

Data Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 39 orang (78%), Diploma III sebanyak 2 orang (4%) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 9 orang (18%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 20 (duapuluh) orang Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) orang serta tidak ada jabatan struktural yang belum terisi. Pejabat struktural dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan tugas-tugas BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

1.5. Inovasi

1. Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah “Kompas Selayar” merupakan akronim dari Klinik Konsultasi Penganggaran SIPD. Kompas Selayar hadir yang bertujuan untuk atau sebagai wadah bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi dalam penyusunan APBD. Kompas Selayar” memiliki filosofi sebagai petunjuk arah. Ibaratnya jika perangkat daerah mengalami kendala maka “Kompas Selayar” menjadi solusi yang sangat tepat. Inovasi ini digagas dengan tujuan agar penyusunan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai prinsip penyusunan APBD.

Kompas Selayar” memiliki filosofi sebagai petunjuk arah. Ibaratnya jika perangkat daerah mengalami kendala maka “Kompas Selayar” menjadi solusi yang sangat tepat. Inovasi ini digagas dengan tujuan agar penyusunan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai prinsip penyusunan APBD. Manfaat “Kompas Selayar” ini dapat memudahkan perangkat daerah dalam menyampaikan keluhan dan berkonsultasi yang mengalami permasalahan-permasalahan dalam penyusunan anggaran perangkat daerah.

2. Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah “Ruko Tetangga” merupakan akronim dari Ruang Konsultasi Tentang Penganggaran SIPD. Ruko Tetangga

hadir sebagai wadah bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dalam penyusunan APBD. “Ruko Tetangga” memiliki filosofi sebagai wadah atau ruang konsultasi. Ibaratnya jika perangkat daerah mengalami kendala maka “Ruko Tetangga” menjadi solusi yang sangat tepat. Inovasi ini digagas dengan tujuan agar penyusunan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai prinsip penyusunan APBD, mengingat masih banyak perangkat daerah belum memahami cara pengoperasian Aplikasi SIPD RI sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah masing-masing OPD.

3. Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah “OPNAME SIMANTAP”. OPTIMALISASI PELAPORAN PENYETORAN PAJAK MELALUI SINERGI PENGAMANAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK. Inovasi ini merupakan sistem yang dipergunakan dalam mengakomodir penyetoran pajak pusat dari mekanisme SP2D LS. Terwujudnya penyempurnaan fitur LS dalam simantap dan terintegrasinya pelaporan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat antara SP2D GU dan SP2D LS. Tersedianya laporan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang berkualitas, dengan demikian semakin besar pajak pusat yang tervalidasi dan terkonfirmasi, maka semakin besar pula dana bagi hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah, yang akan menjadi sumber daya dalam membiayai pembangunan daerah.

3.1. Penghargaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 telah mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Pelaporan Pajak Terbaik di Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dan penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Sinergi dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil atas Pajak-Pajak Pusat melalui APBD di Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 juga mendapatkan penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Makassar atas partisipasinya dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Tahun Akademik 2023/2024.

3.2. Realisasi Keuangan

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Keuangan	166.993.740.900	157.053.092.431	9.940.648.469	94,04%				
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.863.388.814	12.678.814.240	184.574.574	98,56%	100%	100%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.000.000	144.419.700	580.300	99,59%	2 Indikator		10 Dokumen	99,59%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.875.700	124.300	99,58%			3 Dokumen	99,58%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.909.000	91.000	99,39%			1 Dokumen	99,39%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.500.000	27.379.500	120.500	99,56%			1 Dokumen	99,56%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	14.960.200	39.800	99,73%			1 Dokumen	99,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.500.000	27.411.200	88.800	99,67%			1 Dokumen	99,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.931.500	68.500	99,54%			2 Laporan	99,54%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.952.600	47.400	99,68%			1 Laporan	99,68%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.948.930.700	4.815.499.972	133.430.728	97,30%			100%	97,30%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.843.930.700	4.716.202.172	187.456.362	95,09%			59 Orang/Bln	95,09%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.365.300	31.647.000	718.300	97,36%			12 Dokumen	98,98%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.087.700	17.585.000	502.700	97,22%			1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.443.600	12.910.100	2.533.500	83,59%			2 Laporan	98,55%
	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tangapan Pemeriksaan	15.443.600	14.013.700	1.429.900	90,74%			1 Dokumen	98,06%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.659.800	23.142.000	517.800	97,81%			24 Laporan	99,59%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.022.000	239.903.460	1.118.540	99,53%			100%	99,53%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000	0	100%			120 Paket	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.022.000	21.836.260	185.740	99,15%			5 Orang	99,15%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	159.000.000	158.067.200	932.800	99,41%			30 Orang	99,41%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.176.650	810.359.181	13.817.469	98,32%			100%	98,32%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.132.600	233.019.600	3.113.000	98,68%			12 Paket	99,58%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.724.050	134.953.200	770.850	99,43%			1 Paket	99,92%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	8.633.500	6.366.500	57,55%			1 Paket	83,00%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.220.000	8.525.000	1.695.000	83,01%			1 Dokumen	83,01%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	74.886.000	114.000	99,01%			1 Laporan	99,01%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.100.000	350.341.881	1.758.119	99,02%			1 Laporan	99,02%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.862.000	117.700.000	4.162.000	99,96%			100%	99,96%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.462.000	95.620.000	3.842.000	91,07%			4 Unit	91,07%
	Pengadaan Mebel	22.400.000	22.080.000	320.000	98,57%			32 Unit	98,57%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.613.343.940	5.321.472.045	6.145.902.069	94,80%			100%	94,80%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.720.557.984	3.706.922.609	13.635.375	99,63%			3 Laporan	99,63%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.448.090.480	2.438.979.460	9.111.020	99,63%			1 Laporan	99,63%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.749.000	405.029.858	8.719.142	97,89%			100%	97,89%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.660.000	297.210.858	6.449.142	97,87%			80 Unit	97,87%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000	9.380.000	2.270.000	80,51%			36 Unit	80,51%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.439.000	98.439.000	0	100%			1 Unit	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	150.345.731.440	141.355.014.741	1.932.381.079	94,02%	100%	98,61%	100%	94,02%

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	936.000.000	921.230.787	14.769.213	98,42%			100%	98,42%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	118.600.000	115.591.000	3.009.000	97,46%			2 Dokumen	97,46%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	118.600.000	117.455.126	1.144.874	99,03%			2 Dokumen	99,03%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	28.145.000	27.764.300	380.700	98,64%			45 Dokumen	98,64%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	20.000.000	19.916.300	83.700	99,58%			45 Dokumen	99,58%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	20.000.000	19.995.800	4.200	99,98%			45 Dokumen	99,98%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	20.000.000	19.995.800	4.200	99,98%			45 Dokumen	99,98%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	271.855.000	271.052.537	802.463	99,70%			3 Dokumen	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.000.000	137.576.400	2.423.600	98,27%			3 Dokumen	98,27%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	79.400.000	78.428.900	971.100	98,77%			12 Dokumen	98,77%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	79.400.000	76.043.169	3.356.840	95,77%			12 Dokumen	95,77%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	40.000.000	37.411.455	2.588.545	93,53%			12 Dokumen	93,53%
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0			0	0
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	3.423.308.000	3.258.461.928	164.846.072	95,18%			100%	99,88%

Daerah								
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	53.030.000	51.332.000	1.698.000	96,80%			12 Dokumen	96,80%
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.400.000	12.293.800	1.106.200	91,74%			1 Laporan	91,74%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	73.950.000	72.382.900	1.567.100	97,88%			2 Dokumen	97,88%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	48.066.500	46.784.800	1.281.700	97,33%			1 Dokumen	97,33%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	73.903.500	72.864.426	1.039.074	98,59%			12 Dokumen	98,59%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	57.036.000	54.640.125	2.395.875	95,80%			12 Dokumen	95,80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.872.580.000	2.740.274.540	132.305.460	95,40%			12 Laporan	95,40%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.550.000	28.702.698	1.847.302	93,95%			12 Dokumen	93,95%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	113.684.000	100.959.339	12.724.661	88,80%			2 Dokumen	88,80%

	Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait								
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	87.108.000	78.227.300	8.880.700	98,05%			30 Orang	98,05%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.000.000.000	993.613.246	6.386.754	99,36%			100%	99,36%
	Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	260.000.000	77.020.800	182.979.200	29,62%			1 Laporan	29,62%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	350.000.000	81.755.066	268.244.934	23,36%			12 Dokumen	23,36%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	250.000.000	89.103.080	160.896.920	35,64%			1 Laporan	35,64%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.000.000	56.377.700	163.622.300	25,63%			3 Laporan	25,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	1.955.000.000	399.418.000	1.555.582.000	20,43%			1 Dokumen	20,43%
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	275.000.000	18.255.300	256.744.700	66,38%			1 Dokumen	66,38%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	575.000.000	22.936.900	552.063.100	39,90%			5 Dokumen	39,90%

	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	225.000.000	55.388.100	169.611.900	24,62%		1 Dokumen	24,62%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Tekis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	49.578.600	50.421.400	49,58%		1 Dokumen	49,58%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	51.191.700	48.808.300	51,19%		30 Orang	51,19%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100.000.000	69.894.200	30.105.800	69,89%		1 Lembaga	69,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	210.000.000	22.693.800	187.306.200	10,81%		1 Laporan	10,81%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.986.423.440	136.181.708.780	8.804.714.660	93,93%		100%	93,93%
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0%		1 Laporan	0%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	130.564.387.000	128.162.276.995	2.402.110.005	98,16%		1 Laporan	98,16%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.238.779.000	6.378.386.300	860.392.700	88,11%		1 Laporan	88,11%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.183.257.440	1.641.045.485	542.211.955	75,16%		1 Laporan	75,16%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.000.000	1.023.722.509	56.277.491	94,78%		100%	94,78%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.000.000	1.023.722.509	56.277.491	94,78%		100%	94,78%

	Penyusunan Standar Harga	102.641.000	97.491.600	5.149.400	94,98%			1 Dokumen	94,98%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.499.100	14.098.300	3.350.800	80,56%			45 Dokumen	80,56%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	87.400.000	81.967.337	5.432.663	93,78%			1 Laporan	93,78%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	261.863.000	253.583.001	8.279.999	96,83%			1 Laporan	96,83%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	467.980.600	452.225.671	15.754.929	96,63%			1 Laporan	96,63%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.511.900	15.406.800	3.105.100	83,22%			1 Laporan	83,22%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	32.056.400	29.583.300	2.473.100	92,28%			100 Dokumen	92,28%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	21.986.000	14.784.400	7.201.600	67,24%			4 Laporan	67,24%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.630.000	20.451.800	2.178.200	90,37%			1 Laporan	90,37%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47.432.000	44.130.300	3.301.700	93,03%			25 Orang	93,03%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.888.861.497	1.995.540.941	1.893.320.556	51,31%				51,31%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.888.861.497	1.995.540.941	1.893.320.556	51,31%			100%	51,31%
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	768.709.137	378.568.622	390.140.515	49,24%			12 Dokumen	49,24%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	104.376.000	97.567.395	6.808.605	93,47%			2 Dokumen	93,47%

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.000.000	58.292.300	13.707.700	80,96%			1 Laporan	80,96%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	220.000.000	51.463.900	168.536.100	23,39%			4 Unit	23,39%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	513.864.000	513.103.700	760.300	99,85%			20 Laporan	99,85%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69.660.000	64.912.300	4.747.700	93,18%			1 Laporan	93,18%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	90.450.000	87.176.873	3.273.127	96,38%			20 Obyek Pajak	96,38%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	110.000.000	109.726.900	273.100	99,75%			1 Dokumen	99,75%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.000.000	47.901.800	2.098.200	95,80			100 Layanan	95,80
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	105.000.000	101.072.901	3.927.099	96,25%			1 Dokumen	96,25%
	Penagihan Pajak Daerah	123.650.000	121.720.300	1.929.700	98,43%			1 Dokumen	98,43%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	45.393.100	4.606.900	90,78%			1 Dokumen	90,78%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	48.500.000	47.194.700	1.305.300	97,30%			1 Dokumen	97,30%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	378.411.509	271.446.150	106.965.359	71,73%			1 Laporan	71,73%

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Perencanaan dan Keuangan				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	- Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 421.912.746.226,00 - Jumlah APBD = Rp. 1.121.539.457.234,00	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	Data per 31 Desember 2024
		2. Rasio PAD	- Jumlah PAD = Rp. 76.170.396.712,59 - Jumlah PDRB Non Migas	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	Jumlah PDRB Non Migas belum ada data dari BPS
		3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	- Jumlah belanja urusan pemerintahan = Rp. 968.690.723.677,38 - Transfer Expenditures = Rp. 706.696.746.275,38 - Jumlah Belanja APBD = Rp. 1.121.539.457.234,00	- Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 - Dokumen Laporan Keuangan	Data per 31 Desember 2024
		4. Opini Laporan Keuangan	- Tahun 2011 = Disclaimer - Tahun 2012 = Disclaimer - Tahun 2013 = Disclaimer - Tahun 2014 = Disclaimer - Tahun 2015 = WDP - Tahun 2016 = WTP - Tahun 2017 = WTP - Tahun 2018 = WTP - Tahun 2019 = WTP - Tahun 2020 = WTP - Tahun 2021 = WTP - Tahun 2022 = WTP - Tahun 2023 = WTP - Tahun 2024 =	- Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan	Anaudited

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (*Outcome*)

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Manajemen Keuangan				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	- Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi = Rp. 968.690.723.677,38 - Total belanja APBD = Rp. 1.121.539.457.234,-	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	- Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = Rp. 76.170.396.712,59 - Total PAD dalam APBD Rp. 109.660.630.000,00	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		3. Assets Management	- Apakah ada daftar aset tetap (Ya) - Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap (Ya) - Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan (Ya) - Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (Tidak)	- Dokumen Daftar Aset Kabupaten - Semua Aset Kabupaten tercantum di Aplikasi SIMDA BMD	
		4. Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	- Nilai realisasi SILPA = Rp. 75.840.668.848,21 - Total belanja anggaran tahun sebelumnya = Rp. 989.673.418.368,32	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) Keluaran (*Output*)

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Transparansi dan Partisipasi Publik				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	- Belanja Anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda = Rp. 17.029.695.308,00 - Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda = Rp. 12.631.029.686,00	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	- Jumlah dokumen yang dipublikasikan diwebsite pemda = 8 dokumen	- Dokumen Perda APBD - Dokumen Perkada APBD - Nota Keuangan - LRA Seluruh SKPD - LRA PPKD - LKPD yang sudah diaudit - Opini atas LKPD - Dokumen RKA/DPA Kabupaten	Adapun terkait beberapa Dokumen yang dipublikasikan telah dijelaskan dalam Surat Pernyataan Kepala BPKPD Kab. Kep. Selayar

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) Keluaran (*Output*)

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Transparansi dan Partisipasi Publik				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	- Belanja Anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda = Rp.1.112.756.364.234 - Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda = Rp. 938.688.844.764,10	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	- Jumlah dokumen yang dipublikasikan diwebsite pemda = 8 dokumen	- Dokumen Perda APBD - Dokumen Perkada APBD - Nota Keuangan - LRA Seluruh SKPD - LRA PPKD - LKPD yang sudah diaudit - Opini atas LKPD - Dokumen RKA/DPA Kabupaten	Adapun terkait beberapa Dokumen yang dipublikasikan telah dijelaskan dalam Surat Pernyataan Kepala BPKPD Kab. Kep. Selayar

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome)

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Manajemen Keuangan				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	- Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi = Rp. 938.688.844.764,10 - Total belanja APBD = Rp. 1.112.756.364.234	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	- Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = Rp. 38.647.481.411,59 - Total PAD dalam APBD Rp. 109.660.630.001,00	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	
		3. Assets Management	- Apakah ada daftar aset tetap (Ya) - Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap (Ya) - Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan (Ya) - Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (Tidak)	- Dokumen Daftar Aset Kabupaten - Semua Aset Kabupaten tercantum di Aplikasi SIMDA BMD	
		4. Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	- Nilai realisasi SILPA = Rp. 18.219.748.645,65 - Total belanja anggaran tahun sebelumnya = Rp. 989.673.418.368,32	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Perencanaan dan Keuangan				
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	- Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 347.818.586.837 - Jumlah APBD = Rp. 1.112.756.364.234	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	Data per 31 Desember 2024
		2. Rasio PAD	- Jumlah PAD = Rp. 38.647.481.410,59 - Jumlah PDRB Non Migas	Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	Jumlah PDRB Non Migas belum ada data dari BPS
		3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	- Jumlah belanja urusan pemerintahan = Rp. 938.688.844.764,10 - Transfer Expenditures = Rp. 64.361.735.480 - Jumlah Belanja APBD = Rp. 938.688.844.764,10	- Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 - Dokumen Laporan Keuangan	Data per 31 Desember 2024
		4. Opini Laporan Keuangan	- Tahun 2011 = Disclaimer - Tahun 2012 = Disclaimer - Tahun 2013 = Disclaimer - Tahun 2014 = Disclaimer - Tahun 2015 = WDP - Tahun 2016 = WTP - Tahun 2017 = WTP - Tahun 2018 = WTP - Tahun 2019 = WTP - Tahun 2020 = WTP - Tahun 2021 = WTP - Tahun 2022 = WTP - Tahun 2023 = WTP - Tahun 2024 =	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan	Anaudited

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar = **NIHIL**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 ini telah memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), serta efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Secara umum, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah-Penyusunan dan pelaksanaan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Pendapatan Daerah-Realisasi pendapatan daerah, khususnya PAD, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Pengelolaan Aset Daerah–Manajemen aset daerah semakin tertib dengan langkah-langkah perbaikan administrasi dan pemanfaatan aset yang lebih efektif.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas–Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah diaudit dan dilakukan pengawasan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tantangan dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, serta fluktuasi penerimaan daerah akibat faktor eksternal.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan daerah, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan ke depan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Optimalisasi PAD dengan mengembangkan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran;
3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah penyimpangan;
4. Peningkatan Kerjasama dengan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah; dan
5. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan aset daerah.

C. Penutup

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan serta meningkatkan pendapatan daerah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan sejahtera.

Benteng, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016

**32. Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan (Perencanaan dan
Keuangan) Kabupaten/Kota**

**IKK *Outcome* No. 4.a.1
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA PEGAWAI DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	358.688.317.345,00	347.818.586.837,00	96,97%
J u m l a h		358.688.317.345,00	347.818.586.837,00	96,97%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH APBD
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Daerah	1.062.172.839.000,00	905.734.566.922,00	85,27%
2.	Belanja Daerah	1.112.756.364.234,00	905.734.566.922,00	81,40%
3.	Pembiayaan Daerah	45.813.525.234,00	0,00	-
J u m l a h		2.220.742.728.468,00	1.811.469.133.844,00	

Sumber Data: - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data Unaudited BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH PAD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	28.271.091.400,00	13.448.579.509,00	47,57%
2.	Retribusi Daerah	47.922.113.000,00	2.130.754.779,00	4,45%
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95%
4.	Lain-lain PAD yang SAH	20.688.925.600,00	11.062.395.446,39	53,47%
J u m l a h		109.660.630.000,00	38.647.481.410,59	35,24%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH PENDAPATAN PADA APBD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.660.630.000,00	38.647.481.410,59	35,24%
J u m l a h		109.660.630.000,00	38.647.481.410,59	35,24%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN – TRANSFER
EXPENDITURES
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Urusan Pemerintahan	1.112.756.364.234,00	938.688.844.764,10	84,36%
2.	Transfer Expenditures	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49%
Jumlah		980.020.719.794,00	874.327.109.284,10	89,22%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA APBD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	801.974.787.628,00	725.194.271.617,10	90,43%
2.	Belanja Modal	170.807.153.166,00	142.754.451.367,00	83,58%
3.	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11%
4.	Belanja Transfer	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49%
J u m l a h		1.112.756.364.364.234,00	938.688.844.764,10	84,36%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data Unaudited BPK

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAHAN KAR. KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	1	2	3	4	% 2024	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.075.945.912.000,00	960.873.616.761,75	89,31	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.075.945.912.000,00	960.873.616.761,75	89,31		945.693.874.944,08
4.1.01	Pajak Daerah	28.371.091.400,00	7.833.005.474,01	27,71		79.717.225.613,42
4.1.02	Retribusi Daerah	47.022.113.000,00	44.041.389.425,00	91,90		4.834.532.956,00
4.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	11.997.496.593,00	93,89		12.115.146.704,74
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.588.925.600,00	2.586.500.005,74	12,50		48.506.687.976,38
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	109.660.630.000,00	66.458.391.497,75	60,60		79.717.225.613,42
4.2.01	Dana Perimbangan	960.523.452.000,00	894.415.225.264,00	93,12		854.591.939.882,66
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	800.364.105.000,00	757.171.765.274,00	94,63		734.481.618.424,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	15.330.218.800,00	15.330.218.800,00	99,70		18.290.000.217,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	620.900.520.000,00	620.495.260.651,00	99,93		584.336.039.271,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	44.244.896.000,00	40.594.002.855,00	91,75		31.419.707.650,00
4.2.01.05	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	96,46		68.245.693.000,00
4.2.01.06	Insentif Fisikal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	100,00		0,00
4.2.01.07	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	89.187.044.000,00	86.787.635.000,00	97,31		68.245.693.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.972.303.000,00	40.455.824.990,00	57,00		51.864.628.458,66
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.458.831.000,00	34.040.068.817,00	63,68		45.052.940.458,66
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.513.472.000,00	6.415.756.173,00	36,63		6.810.688.000,00
4.2.02.03	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.972.303.000,00	40.455.824.990,00	57,00		51.864.628.458,66
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.761.850.000,00	0,00	0,00		11.384.709.448,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.761.850.000,00	0,00	0,00		11.384.709.448,00
5	BELANJA DAERAH	1.121.539.457.134,00	942.653.868.116,10	84,05		989.673.418.368,32
5.1	BELANJA OPERASI	810.757.880.628,00	729.044.334.969,10	89,92		685.812.944.263,22
5.1.01	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.260.609.194,00	94,50		372.087.952.604,00
5.1.02	Belanja Bahan dan Jasa	311.334.935.234,00	264.390.579.370,10	84,92		284.967.254.713,22
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.384.757.889,00	41.143.312.405,00	88,70		26.120.268.446,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.278.947.000,00	2.249.834.000,00	98,72		2.607.466.500,00
5.2	BELANJA MODAL	170.807.153.166,00	142.869.411.367,00	83,64		170.521.857.369,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	960.060.000,00	512.154.500,00	53,35		332.830.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	19.788.048.470,00	15.409.414.584,00	77,87		20.720.419.471,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.787.580.471,00	71.973.982.522,00	93,73		80.549.478.965,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan	72.691.554.225,00	54.397.846.811,00	74,83		68.627.953.933,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58		62.910.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99		218.635.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11		4.269.780,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11		4.269.780,00
5.4	BELANJA TRANSFER	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49		133.334.346.956,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Desa	1.827.109.140,00	1.372.705.813,00	75,13		1.415.145.007,00
5.4.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa	356.148.300,00	268.339.672,00	75,34		286.964.710,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kepala Desa	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	48,04		131.632.217.149,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49		133.334.346.956,00
JUMLAH BELANJA		1.121.539.457.134,00	942.653.868.116,10	84,05		989.673.418.368,32
SURPLUS/DEFISIT		(45.593.525.234,00)	18.219.748.645,65	(39,96)		(43.979.543.434,24)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6	PEMBLAYAAN DAERAH	45.813.525.234,00	0,00	0,00	89.793.068.500,42
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	0,00	0,00	89.793.068.500,42
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.813.525.234,00	0,00	0,00	89.717.404.829,42
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	0,00	0,00	89.793.068.500,42
	PEMBLAYAAN NETTO	45.813.525.234,00	0,00	0,00	89.793.068.500,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	220.000.000,00	18.219.748.645,65	8.281,70	45.813.525.076,18





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA PEGAWAI DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.912.746.226,76	94,65%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	298.708.508.119,00	290.748.776.725,00	97,33
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.442.853.160,00	105.444.415.998,00	88,28
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.393.286.646,00	15.062.392.365,76	91,88
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.785.077.100,00	9.740.335.305,00	99,54
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	418.635.480,00	230.002.965,00	54,94
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	483.160.000,00	94,57
7	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00	203.662.868,00	40,73
	J u m l a h	445.759.240.505,00	421.912.746.226,76	94,65%

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari s/d 31 Desember 2024

- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah**


NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA APBD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	810.757.880.628,00	752.343.982.330,38	92,79
2.	Belanja Modal	170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,24
3.	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11
4.	Belanja Transfer	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,48
J u m l a h		1.121.539.457.234,00	968.690.723.677,38	87,42

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendaptan
Daerah Kab. Kepulauan Selayar**



NURSAL KHSAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH PAD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	28.271.091.400,00	13.600.326.209,00	48,10
2.	Retribusi Daerah	47.922.113.000,00	42.741.898.637,00	89,19
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95
4.	Lain-lain PAD yang SAH	20.688.925.600,00	7.822.420.190,39	37,81
J u m l a h		109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendaptan
Daerah Kab. Kepulauan Selayar**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

**JUMLAH PENDAPATAN PADA APBD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46
2	Pendapatan Transfer	960.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,52
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54
J u m l a h		1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59	92,82

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendaptan
Daerah Kab. Kepulauan Selayar**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN – TRANSFER
EXPENDITURES
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.912.746.226,76	94,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	311.334.935.234,00	284.784.000.048,62	91,47
J u m l a h		757.094.175.739,00	706.696.746.275,38	93,34

Sumber Data : - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendaptan
Daerah Kab. Kepulauan Selayar**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

JUMLAH APBD
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	796.984.787.628,00	752.343.982.330,38	94,39
2	Belanja Modal	170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,24
3	Belanja Tak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11
4	Belanja Transfer	132.955.644.440,00	64.361.735.480,00	48,41
J u m l a h		1.121.539.457.234,00	968.690.723.677,38	87,42

Sumber Data: - LRA APBD (Konsolidasi) per 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Data *Unaudited* BPK

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendaptan
Daerah Kab. Kepulauan Selayar**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.107.986.364.234,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. pendapatan Daerah | Rp1.062.172.839.000,00 |
| b. belanja Daerah | Rp1.107.986.364.234,00 |

(Defisit)/Surplus

(Rp45.813.525.234,00)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan | Rp45.813.524.234,00 |
| 2. pengeluaran | Rp0,00 |

Pembiayaan Netto Rp45.813.525.234,00

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.062.172.839.000,00 (satu trilyun enam puluh dua milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp109.660.630.000,00 (seratus sembilan milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.271.091.400,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.922.113.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.688.925.600,00 (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp946.750.359.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.778.056.000,00 (delapan ratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.972.303.000,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.761.850.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.761.850.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.107.986.364.234,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp796.984.787.628,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.912.147.905,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.408.935.234,00 (tiga ratus sebelas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.384.757.889,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.278.947.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp170.807.153.166,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp960.060.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.788.048.470,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.787.580.471,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.691.554.225,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp243.910.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp7.238.779.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp132.955.644.440,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.183.257.440,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.772.387.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 20 September 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



M. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
NOMOR 134**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.073.24**



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.000.000.000,00	109.660.630.000,00	14.660.630.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	18.271.091.400,00	28.271.091.400,00	10.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.561.483.000,00	47.922.113.000,00	44.360.630.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.388.925.600,00	20.688.925.600,00	-39.700.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	925.419.265.000,00	946.750.359.000,00	21.331.094.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.136.661.000,00	880.778.056.000,00	2.641.395.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.282.604.000,00	65.972.303.000,00	18.689.699.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	5.761.850.000,00	-1.738.150.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000.000,00	5.761.850.000,00	-1.738.150.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.027.919.265.000,00	1.062.172.639.000,00	34.253.574.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	773.620.104.265,00	796.984.787.628,00	23.364.683.363,00
5.1.01	Belanja Pegawai	441.734.462.547,00	436.912.147.505,00	-4.822.315.042,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.084.774.539,00	311.408.935.234,00	24.324.160.695,00
5.1.05	Belanja Hibah	41.659.055.179,00	46.384.757.889,00	4.725.702.710,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.141.812.000,00	2.278.947.000,00	-862.865.000,00
5.2	BELANJA MODAL	190.273.883.534,00	170.807.153.166,00	-19.466.730.368,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	960.060.000,00	-39.940.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.750.990.410,00	19.788.048.470,00	10.037.058.060,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.238.046.164,00	76.787.580.471,00	-26.450.465.693,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.048.596.960,00	72.691.554.225,00	-3.357.042.735,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236.250.000,00	336.000.000,00	99.750.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	243.910.000,00	243.910.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.131.887.000,00	7.238.779.000,00	-893.108.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.131.887.000,00	7.238.779.000,00	-893.108.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	130.351.130.440,00	132.955.644.440,00	2.604.514.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	2.183.257.440,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	128.167.873.000,00	130.772.387.000,00	2.604.514.000,00
	Jumlah Belanja	1.102.377.005.239,00	1.107.986.364.234,00	5.609.358.995,00
	Total Surplus/(Defisit)	-74.457.740.239,00	-45.813.525.234,00	28.644.215.005,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.457.740.239,00	45.813.525.234,00	-29.644.215.005,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.457.740.239,00	45.813.525.234,00	-29.644.215.005,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	74.457.740.239,00	45.813.525.234,00	-28.644.215.005,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Kepulauan Selayar, 20 September 2024

Bupati



MUH. BASLI ALI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

OPINI LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2014 s.d 2023 (10 Tahun Terakhir)

No	Tahun	No Surat	Opini BPK	Keterangan
1.	2014	54/LHP/XIX.MKS/08/2014	Disclaimer	
2.	2015	28.A/LHP/XIX.MKS/05/2015	WDP	
3.	2016	21.A/LHP/XIX.MKS/06/2016	WTP	
4.	2017	46.A/LHP/XIX.MKS/06/2017	WTP	
5.	2018	43.A/LHP/XIX.MKS/05/2018	WTP	
6.	2019	42.A/LHP/XIX.MKS/05/2019	WTP	
7.	2020	30.A/LHP/XIX.MKS/03/2020	WTP	
8.	2021	28.A/LHP/XIX.MKS/05/2021	WTP	
9.	2022	47.A/LHP/XIX.MKS/05/2022	WTP	
10.	2023	32.A/LHP/XIX.MKS/05/2024	WTP	
11.	2024	-	-	Anaudited BPK

Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)

Benteng, 20 Januari 2025

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Anul Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, ACPA, CFFA
Sertifikasi Negara Akuntan, No. RNA-3530



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	9.390.143.779,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	7.485.671.249,00
2.01	ALAT BESAR	30.000.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.874.220.770,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10.000.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.314.020.863,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	323.977.727,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	2.933.451.889,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.891.832.321,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.891.832.321,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	12.640.209,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	12.640.209,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.419.067.258,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	9,390,143,779,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	7,485,671,249,00
1.3.2.01	ALAT BESAR	30,000,000,00
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	30,000,000,00
1.3.2.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	30,000,000,00
1.3.2.01.02.05.02	mesin proses apung lainnya (dst)	30,000,000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	2,874,220,770,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2,874,220,770,00
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	395,650,000,00
1.3.2.02.01.01.01	Sedan	168,450,000,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	227,200,000,00
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1,281,740,000,00
1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1,281,740,000,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	1,196,830,770,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	1,196,830,770,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10,000,000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	10,000,000,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	10,000,000,00
1.3.2.03.03.01.27	Automatic Distrotion Meter	10,000,000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1,314,020,863,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	414,219,319,00
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	3,800,000,00
1.3.2.05.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1,800,000,00
1.3.2.05.01.01.05	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2,000,000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	289,949,319,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	87,500,000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	11,142,500,00
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi	20,000,000,00
1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	1,087,500,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	18,094,319,00
1.3.2.05.01.04.07	Brandkas	113,525,000,00
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca	38,600,000,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	120,470,000,00
1.3.2.05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	40,000,000,00
1.3.2.05.01.05.12	Mesin Absensi	14,500,000,00
1.3.2.05.01.05.21	Perforator Besar	29,970,000,00
1.3.2.05.01.05.53	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1,500,000,00
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya	34,500,000,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	787,969,317,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	347,850,113,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	27,600,000,00
1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	7,255,227,00
1.3.2.05.02.01.16	Meja Tambahan	24,388,182,00
1.3.2.05.02.01.17	Meja Panjang	1,125,000,00
1.3.2.05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	93,386,136,00
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	49,500,000,00
1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu	32,336,364,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	70,628,750,00
1.3.2.05.02.01.33	Kursi Biasa	6,516,818,00
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu	16,300,000,00
1.3.2.05.02.01.39	Meja Komputer	18,813,636,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	8,500,000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	8.500.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	322.269.204,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	13.905.114,00
1.3.2.05.02.04.03	A.C. Window	214.914.090,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	93.450.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	109.350.000,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	76.550.000,00
1.3.2.05.02.06.08	Sound System	8.000.000,00
1.3.2.05.02.06.10	Laser Disc	22.500.000,00
1.3.2.05.02.06.59	Gordyln/Kray	2.300.000,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	111.832.227,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	34.053.909,00
1.3.2.05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3.865.909,00
1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12.038.000,00
1.3.2.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9.150.000,00
1.3.2.05.03.01.07	Meja Kerja Pejabat Eselon V	9.000.000,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	17.700.000,00
1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1.700.000,00
1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16.000.000,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	22.080.000,00
1.3.2.05.03.04.08	Kursi Rapat Pejabat lainnya	22.080.000,00
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	31.000.000,00
1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	26.000.000,00
1.3.2.05.03.06.05	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5.000.000,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	6.998.318,00
1.3.2.05.03.07.09	Buffet Kaca	3.479.318,00
1.3.2.05.03.07.10	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3.519.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	323.977.727,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	302.977.727,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	35.000.000,00
1.3.2.06.01.01.05	Audio Amplifier	30.000.000,00
1.3.2.06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	5.000.000,00
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	141.222.727,00
1.3.2.06.01.02.03	Camera Electronic	7.700.000,00
1.3.2.06.01.02.15	Video Mixer	55.000.000,00
1.3.2.06.01.02.31	Video Effect Generator	6.000.000,00
1.3.2.06.01.02.60	Camera Film	14.500.000,00
1.3.2.06.01.02.61	Lensa Kamera	2.600.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	18.500.000,00
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	12.122.727,00
1.3.2.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	24.800.000,00
1.3.2.06.01.04	PERALATAN CETAK	126.755.000,00
1.3.2.06.01.04.19	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	126.755.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	1.000.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1.000.000,00
1.3.2.06.02.01.03	Pesawat Telephone	1.000.000,00
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	20.000.000,00
1.3.2.06.03.47	SUMBER TENAGA	20.000.000,00
1.3.2.06.03.47.02	Genset	20.000.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	2.933.451.889,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	2.119.360.671,00
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	27.500.000,00
1.3.2.10.01.01.01	Mainframe (Komputer Jaringan)	27.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	2.071.010.671,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	649.996.000,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	1.175.427.071,00
1.3.2.10.01.02.03	Note Book	73.364.000,00
1.3.2.10.01.02.09	Tablet PC	119.750.000,00
1.3.2.10.01.02.10	Personal Komputer lainnya	52.473.600,00
1.3.2.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	20.850.000,00
1.3.2.10.01.03.01	Komputer Unit Lainnya	20.850.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	814.091.218,00
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	10.000.000,00
1.3.2.10.02.02.09	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	10.000.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	563.691.218,00
1.3.2.10.02.03.01	CPU (Peralatan Personal Komputer)	15.000.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	334.508.218,00
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	63.583.000,00
1.3.2.10.02.03.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	150.600.000,00
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	208.500.000,00
1.3.2.10.02.04.01	Server	176.500.000,00
1.3.2.10.02.04.02	Router	4.000.000,00
1.3.2.10.02.04.23	Wireless Access Point	1.000.000,00
1.3.2.10.02.04.33	Peralatan Jaringan lainnya	27.000.000,00
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	31.900.000,00
1.3.2.10.02.05.01	Peralatan Komputer lainnya	31.900.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.891.832.321,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.891.832.321,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1.891.832.321,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.891.832.321,00
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.891.832.321,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	12.640.209,00
1.3.4.03	INSTALASI	12.640.209,00
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	12.640.209,00
1.3.4.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	12.640.209,00
1.3.4.03.05.02.02	Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	12.640.209,00
1.5	ASET LAINNYA	1.419.067.258,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	828.897.900,00
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	828.897.900,00
1.5.3.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	828.897.900,00
1.5.3.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	557.402.900,00
1.5.3.01.01.02.01	Lisensi dan Frenchise	557.402.900,00
1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	271.495.000,00
1.5.3.01.01.05.01	Software	271.495.000,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	590.169.358,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	590.169.358,00
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	590.169.358,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	590.169.358,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	590.169.358,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KERTAS KERJA ASSET TETAP
Per 31 Desember 2024

KODE ASSET	NAMA	SALDO AWAL 2024	BENTENG TANGGAS								MUTASI KAMPUNG								SALDO AKHIR 2024	
			REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN	REKONSTRUKSI / PERAWATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01 ASSET TETAP		2.264.924.841,93	346.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.820.000,00	-	2.583.904.841,93
01 TANAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 PERALATAN DAN MESIN		7.156.891.248,00	346.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.820.000,00	-	7.485.671.248,00
01 ALAT BESAR		30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
02 ALAT ANGKUTAN		2.796.420.770,00	95.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.874.220.770,00
03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.820.000,00	-	10.000.000,00
04 ALAT PERTANJAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 ALAT KANTOR DAN RUANG TANGGA		1.247.080.863,00	96.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.314.020.863,00
06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANGKAT		323.977.727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.977.727,00
07 ALAT MEDIS/TERAPI DAN KESEHATAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 ALAT LABORATORIUM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 ALAT PERSENIJATAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 KOMPUTER		2.740.201.888,00	184.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.933.451.888,00
11 ALAT EKSPLOKASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 ALAT PENGGERAKAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ALAT BANTU EKSPLOKASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ALAT KESELAMATAN KERJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ALAT PERAGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 RAMBU - RAMBU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 PERALATAN OLAH RAGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 GEDUNG DAN BANGUNAN		1.891.832.321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891.832.321,00
01 BANGUNAN GEDUNG		1.891.832.321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891.832.321,00
02 MUKJUMIN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 BANGUNAN MEWAHA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 TUGAS TITIK KONTROL/PAKSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		12.640.209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.640.209,00
01 JALAN DAN JEMBATAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 BANGUNAN AIR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 INSTALASI		12.640.209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.640.209,00
04 JARINGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 ASSET TETAP LAINNYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 BAHAN PERPUSTAKAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 BARANG BERKORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/LAINNYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 NEMAK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 BOTA PERAIRAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 TANAMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ASSET TETAP DALAM RENOVASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 AKUMULASI PENYUSUTAN		(6.796.238.937,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.796.238.937,07)
01 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		(6.298.339.093,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.298.339.093,07)
02 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN		(495.029.456,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(495.029.456,00)
03 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		(2.870.388,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.870.388,00)
04 AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET TETAP LAINNYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 ASSET LAINNYA		492.524.140,17	-	-	-	-	-	-	14.774.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.298.640,17
03 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 ASSET TIDAK BERWUJUD		828.897.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.897.900,00
04 ASSET TIDAK BERWUJUD		828.897.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.897.900,00
04 ALAT LAIN LAIN		575.394.858,00	-	-	-	-	-	-	14.774.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.169.358,00
01 ASSET LAIN LAIN		575.394.858,00	-	-	-	-	-	-	14.774.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.169.358,00
05 AKUMULASI AMORTISASI ASSET TIDAK BERWUJUD		(828.897.900,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(828.897.900,00)
01 AKUMULASI AMORTISASI ASSET TIDAK BERWUJUD		(828.897.900,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(828.897.900,00)
06 AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET LAINNYA		(92.870.717,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.870.717,83)
01 AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET LAINNYA		(92.870.717,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.870.717,83)

Mengetahui :
 191 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN PENDAPATAN
 DAERAH

NURSAL IKHSAN, S.E., M.A.C.
 Pangkat : Pembina Tk. I / IV b
 NIP. 19830525 200604 1 016

BENTENG, 31 Desember 2024
 PENGURUS BARANG

ANDI ADHYATMA, S.E
 NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.01.22.13.13.01.01.1994 Intra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000002	Honda Win	97 CC	BESI	1994	-	MH1HA000SSK12 6114	HAE-222949	DD 2013 J		Hibah	3.514,00	Motor Rusak Berat DD 2013 J / 6919 JC
Jumlah Harga														3.514,00	

MENGETAHUI
PIL. KEPALA BPKPD

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si
NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E
NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.02.22.13.13.01.01.01.2021 Extra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.10.002.002.017	Peralatan Minikomputer lainnya	000001	Sandisk / Flashdisk	320 GB	Plastik	2021						Pembelian	250,00	Flashdisk (Mardania)
2	1.3.2.10.002.002.017	Peralatan Minikomputer lainnya	000002	Sandisk / Flashdisk	320 GB	Plastik	2021						Pembelian	250,00	Flashdisk (Rosniah)
3	1.3.2.10.002.002.017	Peralatan Minikomputer lainnya	000003	Sandisk / Flashdisk	320 GB	plastik	2021						Pembelian	250,00	Flashdisk (Nursal Ikhsan)
Jumlah Harga														750,00	

MENGETAHUI
Pit. KEPALA BPKPD

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si
NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E
NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.01.22.13.13.01.01.00.2009

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001.001	000001	Baik		Beton		Jl. Jend. Ahmad Yani Kec. Benteng						Pembelian	1.891.832,32	BPKPAD
Jumlah Harga															1.891.832,32	

MENGETAHUI
Pit. KEPALA BPKPD

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.01.22.13.13.01.01.00.2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	1.3.4.03.005.002.002	000001					JL. JEND AHMAD YANI NO.1	23/12/2013				Pembelian	12.640,21	Baik	JARINGAN LISTRIK
Jumlah Harga														12.640,21		

MENGETAHUI
PIL. KEPALA BPKPD

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si
NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E
NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
NO. KODE LOKASI : 12.01.22.13.13.01.01.00.2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang 1.5.	Regis- ter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lisensi dan Franchise	1.5.3.01.001.002.001	0000	2013	Aplikasi PPB-P2	Pihak Ke tiga			Pembelian	557,402,900.00	Aplikasi PPB-P2
2.	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2013	Aplikasi gaji , Simbadde & Visualisasi Informasi Keuangan				Pembelian	271,495,000.00	@ Aplikasi Gaji Rp. 148.995000,- @ Aplikasi Simbadde Rp. 75.000.000,@Aplikasi Visualiasi Keuangan Daerah Rp. 47.500.000,-
Jumlah Harga										828,897,900.00	

MENGETAHUI
PIH. KEPALA BPKPD

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si
NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E
NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : KEPALA DINAS

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sepeda Motor	Honda Win	-	97 CC	BESI	1994	1.3.2.02.001.004.001	1	3.514,00	0	0	1	Motor Rusak Berat DO
2	Sepeda Motor	Honda Win / WIN	HAE-2225963	97 CC	BESI	2008	1.3.2.02.001.004.001	1	3.514,00	0	0	1	2013) / 6919 JC
3	Sepeda Motor	Yamaha / N Max Abs 155		155	Besi+Plastik Fiber	2020	1.3.2.02.001.004.001	1	34.700,00	1	0	0	NUR SALEH NURDIN
4	Sepeda Motor	Yamaha N Max / Sepeda Motor Matic		155	Plastik, Besi	2023	1.3.2.02.001.004.001	1	34.600,00	1	0	0	(BAPEMDESKEL)
5	Sepeda Motor	Yamaha / Mio M3 (Green - White)		125	Fiber - Besi	2024	1.3.2.02.001.004.001	1	20.470,00	1	0	0	NUR AHMAD
6	Rak Besi	Made IN China / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.003	1	2.500,00	1	0	0	AFFANDI (STAF
7	Filing Cabinet Besi	WIFILE			BESI	2017	1.3.2.05.001.004.005	1	2.000,00	1	0	0	BIDANG ANGGARAN
8	White Board	-			KAYU TRIPLES	2003	1.3.2.05.001.005.005	1	101,25	1	0	0	)
9	Meja Rapat	-			SERBUK	2011	1.3.2.05.002.001.008	2	5.522,73	2	0	0	Sepeda Motor N-Max
10	Meja Telepon	-			KAYU SERBUK	2003	1.3.2.05.002.001.012	1	90,00	1	0	0	155 Non Abs Warna
11	Meja Tambahan	Slantara			SERBUK	2011	1.3.2.05.002.001.016	1	1.988,18	1	0	0	Hita (Kepala Badan)
12	Meja 1/2 Biro	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	1	1.080,00	1	0	0	Kendaraan Dinas Roda
13	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	1.500,00	1	0	0	2 Kepala Badan (Nursol
14	Kursi Rapat	CHITOSE			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	2	990,00	2	0	0	Ikhsan)
15	Kursi Rapat	CHITOSE			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	10	4.950,00	10	0	0	Rak TV/Tripod LCD
16	Kursi Tamu	MILANO PROCELLA			SERBUK BESA	2011	1.3.2.05.002.001.031	1	4.418,18	1	0	0	RUANG KABAN (
17	Kursi Tamu	MILANO PROCELLA			SERBUK BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.031	1	4.418,18	1	0	0	AJUDAN)
18	Kursi Biasa	FUTURA			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.033	20	6.516,82	20	0	0	MEJA RAPAT
19	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-			Fiber	2018	1.3.2.05.002.003.001	1	1.000,00	1	0	0	MEJA TELPON



PEMERINTAH KABUPATEN SELAT

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

20	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-			Fiber	2018	1.3.2.05.002.003.001	1	1.000,00	1	0	0	Blower Fan (Mesin Penghisap Asap Rokok) Ruang Kaban
21	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Electrolux / Vacuum Cleaner	12980065		Plastik	2021	1.3.2.05.002.003.001	1	6.500,00	1	0	0	
22	Lemari Es	SHARP	9392314802263		FIBER	2014	1.3.2.05.002.004.001	1	2.000,00	1	0	0	
23	A.C. Window	SHARP / 2 PK			FIBER	2011	1.3.2.05.002.004.003	1	7.455,68	1	0	0	
24	A.C. Split	Panasonic / Pendingin Ruangan	24805405451	2 PK	Plastik	2020	1.3.2.05.002.004.004	1	8.800,00	1	0	0	RUANGAN KABAN
25	Kompor Gas (Alat Dapur)	RINNAI	R1522E		PLASTIK	2014	1.3.2.05.002.005.002	1	750,00	1	0	0	
26	Tabung Gas	PERTAMINA		12 KG	BESI	2014	1.3.2.05.002.005.009	1	750,00	1	0	0	
27	Televisi	SHARP / LCD	13102166	32 Inch	FIBER	2014	1.3.2.05.002.006.002	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
28	Televisi	Sharp / Google TV	406716715	55 Inch	Fiber	2024	1.3.2.05.002.006.002	1	8.700,00	1	0	0	Televisi Ruang Kaban
29	Televisi	Sharp / Google TV	406717118	55 Inch	Fiber	2024	1.3.2.05.002.006.002	1	8.700,00	1	0	0	Televisi Ruang Kaban
30	Lambang Garuda Pancasila	-			TEMBAGA	2001	1.3.2.05.002.006.028	1	56,25	1	0	0	B&B
31	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.006.029	1	67,50	0	1	0	(**)
32	Dispenser	ARISA TCL	6124014		PLASTIK	2014	1.3.2.05.002.006.038	1	1.000,00	1	0	0	
33	Gordyn/Kray	-			Kain	2021	1.3.2.05.002.006.059	1	1.150,00	1	0	0	Gorden Ruang Kaban
34	Gordyn/Kray	-			Kain	2021	1.3.2.05.002.006.059	1	1.150,00	1	0	0	Gorden Ruang Kaban
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Gudiko			SERBUK	2011	1.3.2.05.003.001.004	1	3.865,91	1	0	0	
36	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - BESI	2024	1.3.2.05.003.004.008	17	11.730,00	17	0	0	Kursi Pejabat Ruang Kepala Badan
37	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Hofer / Sofa dan Meja Set			Busa	2021	1.3.2.05.003.006.004	1	13.000,00	1	0	0	Sofa dan kursi di ruangan kaban
38	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Hofer / Sofa dan Meja Set			Busa	2021	1.3.2.05.003.006.004	1	13.000,00	1	0	0	Sofa dan Meja Set di Ruangan Kaban
39	Buffet Kaca	-			KAYU/SERBUK	2011	1.3.2.05.003.007.009	1	3.479,32	1	0	0	LEMARI KACA
40	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-FT77CX	4DAWC027772	-	Besi Melamin	1998	1.3.2.06.002.001.001	1	900,00	0	1	0	Faxmille
41	Pesawat Telephone	Panasonic / -	PFXEC8052	-	FIBER	2002	1.3.2.06.002.001.003	1	101,25	0	1	0	Telepon @@@
42	Lap Top	YOGA / IS-7200	S/N : MP192AZU	RAM 4 GB HDD	MELAMIN	2017	1.3.2.10.001.002.002	1	13.000,00	1	0	0	LAPTOP (KABAN) H A NUR HALIQ
43	Lap Top	ASUS / ROG-STRIX G7 12LU 176686T	L9NRKD027052378		Plastik	2020	1.3.2.10.001.002.002	1	39.878,30	1	0	0	KEPALA BADAN (MESDIYONO)
44	Personal Komputer lainnya	Lenovo 730 / -	Q501084079	-	FIBER GLASS	2013	1.3.2.10.001.002.010	1	32.222,00	1	0	0	Desktop
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360	XCDF		FIBER	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	3.000,00	1	0	0	RUANG KABAN
46	Peralatan Personal Komputer lainnya	Ica 1300 VA / 1300VA		-	BESI	2013	1.3.2.10.002.003.018	1	1.500,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Jumlah Harga		322.129,55	
--------------	--	------------	--

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

MENGETAHUI
PIR. KEPALA BPKPD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : RUANG SEKRETARIS

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kewawah)	TOYOTA / AVANZA 1.5		1496 CC	BESI	2016	1.3.2.02.001.002.003	1	231.700,00	1	0	0	Husain S.SOS (Sekretaris)
2	Sepeda Motor	VELOZ M/T Suzuki Shogun RR / -	-	125 CC	Besi Metal Plastik	2009	1.3.2.02.001.004.001	1	14.360,00	1	0	0	Mardania (KENDARAAN LAPANGAN) DD 3194 J
3	Sepeda Motor	Suzuki Shogun RR / -	-	125 CC	Besi Metal Plastik	2009	1.3.2.02.001.004.001	1	14.360,00	1	0	0	NUR SANAWATI (DD 3201 J
4	Sepeda Motor	YAMAHA / ALL NEW SOUL GT		125	BESI	2017	1.3.2.02.001.004.001	1	18.976,30	1	0	0	ADIYATMA (STAF SEKRETARIAT)
5	Sepeda Motor	Yamaha / Vino Premium Blue Core Vin 2019		125	Besi-Plastik Fiber	2020	1.3.2.02.001.004.001	1	20.500,00	1	0	0	KENDARAAN DINAS (RITAWATI)
6	Sepeda Motor	Yamaha / Mio M3 AKS SSS		125	Besi-Plastik Fiber	2020	1.3.2.02.001.004.001	1	18.500,00	1	0	0	MEGAWATI (RUANG BENDAHARA)
7	Sepeda Motor	VIN 2019 Yamaha Mio M3 / Sepeda Motor Matic		125	Plastik - Besi	2021	1.3.2.02.001.004.001	2	36.325,00	2	0	0	ISWADI (RUANG SEKRETARIAT)
8	Sepeda Motor	Yamaha Gear / Sepeda Motor Matic		125	Plastik, Besi	2023	1.3.2.02.001.004.001	1	21.340,00	1	0	0	Sepeda Motor Matic Yamaha Gear 125 CC (Sekretaris Badan)
9	Mesin Ketik Listrik Patable (11-13 Ino)	Brother / GX-6750	75K313896	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.001.005	1	2.000,00	1	0	0	Mesin Ketik Listrik/Staf
10	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITISEN			PLASTIK FIBER	2011	1.3.2.05.001.002.003	2	331,36	0	0	2	(**)
11	Lemari Besi/Metal	WIFILI			BESI	2014	1.3.2.05.001.004.001	1	3.000,00	1	0	0	
12	Lemari Besi/Metal	Wifile / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Ansip Pintu Kaca/
13	Lemari Besi/Metal	Wifili / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.001	2	6.000,00	2	0	0	Lemari Besi/Ansip/STAF
14	Lemari Besi/Metal	brotder			besi	2018	1.3.2.05.001.004.001	2	7.000,00	2	0	0	Lemari besi Pintu dorong
15	Lemari Besi/Metal	Brother			besi	2019	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Besi
16	Lemari Kaca	WIFILE			BESI /KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	1	3.500,00	1	0	0	RUANG SEKRETARIS
17	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / CCTV	SN : K56085161-SN : K67763663		Plastik	2022	1.3.2.05.001.005.002	1	40.000,00	1	0	0	
18	Mesin Absensi	SOLUTION / X 100-C			FIBER	2017	1.3.2.05.001.005.012	1	10.000,00	1	0	0	MESIN ABSENSI



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
KARTU INVENTARIS RUANGAN
PER 31-Dec-2024

19	Meja Kerja Kayu	Activ Gallant 02				2019	1	2.000,00	1	0	0	Meja kerja
20	Meja 1/2 Biro	-				2003	3	3.240,00	3	0	0	MEJA 1/2 BIRO
21	Meja 1/2 Biro	ORBITREND	-			2012	2	2.000,00	2	0	0	
22	Kursi Rapat	CHITOSE				2011	3	1.485,00	3	0	0	KURSI BEST
23	Kursi Tamu	LIGNA				2006	1	3.500,00	1	0	0	
24	Kursi Putar	-				2003	1	900,00	1	0	0	KURSI PUTAR BESAR
25	Kursi Putar	PRONTLINE	-			2012	1	650,00	0	0	1	KURSI KOMPUTER ##
26	Kursi Putar	Creative / 102 KD	-			2012	2	2.000,00	2	0	0	KURSI 102 KD
27	Kursi Putar	Activ Km 101				2019	2	3.000,00	2	0	0	Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan
28	Meja Komputer	-				2012	1	2.406,82	1	0	0	
29	Meja Komputer	KAYU LOKAL				2014	1	1.250,00	1	0	0	
30	Lemari Es	SHARP				2011	1	1.684,43	1	0	0	
31	A.C. Window	PANASONIC				2007	1	3.665,00	1	0	0	
32	A.C. Window	PANASONIC				2012	1	5.575,00	1	0	0	
33	A.C. Window	PANASONIC / 2 PK	3700799142			2016	1	8.000,00	1	0	0	AC RUANG SEKRETARIAT (Suat)
34	A.C. Split	LG / Pendingin Ruangan	SINQ09WASAA	1 PK		2020	1	5.600,00	1	0	0	RUANG SEKRETARIAT
35	A.C. Split	LG / Pendingin Ruangan	003HAGCT535	1 PK		2020	1	5.600,00	1	0	0	RUANG SEKRETARIAT
36	A.C. Split	Panasonic / AC split	FTC255NV14			2022	1	5.000,00	1	0	0	AC Split Ruang Sekretaris
37	Televisi	Sony 46" / 46 INCI	SN : 2704089-G			2013	1	9.900,00	1	0	0	TV LED
38	Televisi	SAMSUNG / LCD				2014	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
39	Televisi	SONY /48" / LCD	43059138			2014	1	12.000,00	1	0	0	TELEVISI
40	Sound System	AA				2014	1	8.000,00	1	0	0	
41	Laser Disc	TOSHIBA / TLP781DE	8763507			2003	1	22.500,00	1	0	0	IN FOCUS
42	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan				2024	1	690,00	1	0	0	Kursi Pejabat Ruang Kepala Badan
43	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan				2024	2	1.380,00	2	0	0	Kursi Pejabat Ruang Sekretariat
44	Lemari Arap Pejabat lainnya	Brother / Lemari Besi				2021	1	3.519,00	1	0	0	Lemari Besi Sekretariat
45	Microphone/Wireless MIC	panasonic				2016	2	5.000,00	2	0	0	mic wireless (MPTGA)
46	Camera Electronic	Canon / DC 7.4V 700 D	328075025573	-		2015	1	7.700,00	1	0	0	Camera SLR
47	Alat Studio Video Lainnya	Yamaha PSR-SR950 / SR950	INAC7N02018	-		2013	1	24.800,00	1	0	0	Sound System
48	Pesawat Telephone	Panasonic / -				2003	1	90,00	1	0	0	
49	Wireless Amplifier	Acce Point / -	-			2011	1	850,00	1	0	0	
50	P.C Unit	KOMPUTER PC / CQ 3623				2012	1	9.000,00	1	0	0	
51	P.C Unit	HP	3CR320PWS			2013	1	8.500,00	1	0	0	
52	Lap Top	SONI VAIO / 35 FG				2012	1	12.000,00	1	0	0	
53	Lap Top	lenovo / 1.5	PPQE156T			2016	1	10.000,00	1	0	0	Sekretariat/BU TDA



PEMERINTAH KABUPATEN SELAT

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

54	Lap Top	lenovo / i5	PFOE1HLM		fiber	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	Sekretariat/ISNAWATI
55	Lap Top	lenovo			otkari	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	8.500,00	1	0	0	laptop lenovo (Hj Raja)
56	Lap Top	lenovo			fiber	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	11.500,00	1	0	0	laptop (asmawati)
57	Lap Top	lenovo			fiber	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	11.500,00	1	0	0	laptop (lenawati)
58	Lap Top	LENOVO / Core i5	PF1GEUNF		MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	9.895,00	1	0	0	LAPTOP BIDANG SEKRETARIAT (ANDI ADHYATMA)
59	Lap Top	LENOVO / Core i5	PF1GPV55		MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	9.895,00	1	0	0	LAPTOP BIDANG SEKRETARIAT (MARDANIA)
60	Lap Top	Lenovo Thinkpad E-14 Core i3 / Laptop			Plastik	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	9.300,00	1	0	0	Laptop Sekretariat (Mardania)
61	Lap Top	Lenovo Thinkpad E-14 Core i3 / Laptop	PF30CJ19		Plastik	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	9.300,00	1	0	0	Laptop Sekretariat (Rosniah, S.E, M.M)
62	Lap Top	Lenovo Thinkpad E-14 Core i3 / Laptop	PF30E18C		Plastik	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	9.300,00	1	0	0	Laptop Sekretariat (Arpa Wijaya)
63	Lap Top	Acer Travelmate	UNVU7SD02T40401 0F3061		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.002	1	14.950,00	1	0	0	Kepala Badan BPKPD (Nursal Ikhsan)
64	Lap Top	LENOVO IDEAPAD 1 14AMN7	MP2C7DWQ		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.002	1	9.950,00	1	0	0	Ruang Sekretariat (Andi Adhyatma, S.E)
65	Note Book	ASUS / 3050	G3N0CX0401481DA		FIBER	2016	1.3.2.10.001.002.003	1	4.100,00	1	0	0	SEKRETARIAT/Staf Sekretariat
66	Note Book	Asus Expertbook B3	R1NKNZ003226016		Plastik Fiber	2023	1.3.2.10.001.002.003	1	10.066,00	1	0	0	Include With Keyboard and USB Type C Hub
67	Note Book	Asus Expertbook B3	R1NKNZ004353010		Plastik Fiber	2023	1.3.2.10.001.002.003	1	10.066,00	1	0	0	Include With Keyboard And USB Type C Hub
68	Note Book	Asus Expertbook B3	R1NKNZ00454101E		Plastik Fiber	2023	1.3.2.10.001.002.003	1	10.066,00	1	0	0	Include With Keyboard and USB Type C Hub
69	Komputer Unit Lainnya	Logitech MK220 / Keyboard	SN 2103SC109ES9		Plastik	2021	1.3.2.10.001.003.001	1	450,00	1	0	0	Keyboard Sekretariat (Arpa Wijaya)
70	Komputer Unit Lainnya	Logitech MK220 / Keyboard Laptop	SN 2103SC10SDN9		Plastik	2021	1.3.2.10.001.003.001	1	450,00	1	0	0	Keyboard Sekretariat (Rosniah, S.E, M.M)
71	Komputer Unit Lainnya	Logitech MK220 / Keyboard	SN 2103SC10SDQ9		Plastik	2021	1.3.2.10.001.003.001	1	450,00	1	0	0	Keyboard Sekretariat (Mardania)
72	Peralatan Minikomputer lainnya	Sandisk / Flashdisk		320 GB	Plastik	2021	1.3.2.10.002.002.017	1	250,00	1	0	0	Flashdisk (Mardania)
73	Peralatan Minikomputer lainnya	Sandisk / Flashdisk		320 GB	Plastik	2021	1.3.2.10.002.002.017	1	250,00	1	0	0	Flashdisk (Rosniah)
74	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Dazumba / core	-	-	Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.001	1	4.000,00	1	0	0	CPU/Staf Sekretariat
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon			FIBER	2011	1.3.2.10.002.003.003	1	883,64	0	0	1	(**)
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / -	-	-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	2	4.300,00	2	0	0	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASER JET P 1102 / P 1102	VNCSH16243	-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	1.500,00	1	0	0	
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON MX397	010-006534277		FIBER	2014	1.3.2.10.002.003.003	1	1.755,00	0	0	1	
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 287	LFRG 26888	-	FIBER	2016	1.3.2.10.002.003.003	1	1.500,00	1	0	0	PRINTER (Staf Sekretariat)
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360			Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	3.250,00	1	0	0	Printer Staf Sekretaris
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / L 360	S/N : X3GWS04921		Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	3.500,00	1	0	0	Printer MPTGR
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / L 360	S/N : X3GWS27300		Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	3.500,00	1	0	0	Printer MPTGR
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Office Jet Pro 7740	CN09C5501T		Plastik	2020	1.3.2.10.002.003.003	1	9.432,50	1	0	0	PRINTER BIDANG SEKRETARIAT



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210 / Printer Ecotank	C11C68503	Plastik	2022	1.3.2.10.002.003.003	1	3.876,00	1	0	0	Printer Epson Ruang Sekretariat
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Ink Efficient G3200	KMNX07686	Plastik	2023	1.3.2.10.002.003.003	1	3.154,00	1	0	0	Printer Canon Ink Efficient G3200 di ruang Sekretariat meja Kasubag. Umum & Kepeg
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother DCP-T420 DCP T420 Original	380718N3N246539	Plastik	2024	1.3.2.10.002.003.003	1	3.250,00	1	0	0	Ruang Sekretariat
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother DCP-T420 DCP T420 Original	EB0718N3N255911	Plastik	2024	1.3.2.10.002.003.003	1	3.250,00	1	0	0	Ruang Sekrtariat
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu / F17140	AMSA354674	Plastik	2020	1.3.2.10.002.003.004	1	20.234,50	1	0	0	BIDANG AKUNTANSI
89	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / DS-1630	XZVZ021794		2023	1.3.2.10.002.003.004	1	6.307,00	1	0	0	Scanner Epson DS-1630 Ruang Sekretariat
90	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / DS-1630	XZVZ021792	Plastik	2023	1.3.2.10.002.003.004	1	6.307,00	1	0	0	Scanner Epson DS-1630 Ruang Sekretariat BPKPD
91	Peralatan Personal Komputer lainnya	Ica 1300 VA / 1300 VA	1C1131300017	BESI	2013	1.3.2.10.002.003.018	1	1.500,00	1	0	0	
92	Peralatan Komputer lainnya	Laserjet 107 / Printer	CN82N9GY8V	Plastik	2021	1.3.2.10.002.005.001	1	2.950,00	1	0	0	Printer Ruang Sekretariat
93	Peralatan Komputer lainnya	Brother DCP-T420W / Printer	EB0718A1H410953	Plastik	2021	1.3.2.10.002.005.001	1	5.000,00	1	0	0	Printer Ruang Sekretariat
Jumlah Harga								892.565,55				

MENGETAHUI
PIT, KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sub
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah U P B:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : RUANG AULA

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lemari Besi/Metal	Brother			Besi	2020	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	RUANG AULA
2	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Arsip			Besi	2020	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	RUANG AULA
3	Rak Besi	Made IN China / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.003	1	2.500,00	1	0	0	Rak TV/Tripod LCD
4	Lemari Kaca	-			BESI ALUMINIUM/KACA	2012	1.3.2.05.001.004.027	1	3.600,00	1	0	0	
5	Alat Kantor Lainnya	BAJU JAS / -	-	-	KAIN	2012	1.3.2.05.001.005.088	1	1.000,00	1	0	0	JAS HITAM
6	Meja Rapat	OLIMPI			SERBUK	2002	1.3.2.05.002.001.008	1	1.732,50	0	1	0	
7	Meja Tambahan	-	-	-	KAYU SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.016	4	16.600,00	4	0	0	KURSI PUTAR MPTGR
8	Meja Tambahan	- / -	-	240x60x75 cm	KAYU SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.016	1	5.800,00	1	0	0	
9	Kursi Rapat	CHITOSE			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	50	24.750,00	50	0	0	KURSI BESI
10	Kursi Putar	-	-	-	BESI BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	7	9.100,00	7	0	0	KURSI PUTAR MPTGR
11	A.C. Window	PANASONIC		2 PK	FIBER	2012	1.3.2.05.002.004.003	1	6.750,00	1	0	0	
12	A.C. Window	Panasonic 2 PK / -	SN : 3425242484	2 PK	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	8.500,00	1	0	0	
13	A.C. Window	PANASONIC	3425259894	2 PK	PLASTIK FIBER	2014	1.3.2.05.002.004.003	1	8.000,00	1	0	0	AC
14	A.C. Split	Panasonic / Air Conditioner	SN. 24812326464	2 PK	Plastik	2021	1.3.2.05.002.004.004	1	9.500,00	1	0	0	AC Ruang Aula
15	Kipas Angin	-			PLASTIK FIBER	2003	1.3.2.05.002.004.006	1	337,50	0	0	1	(**)
16	Alat Rumah Tangga Lain-lain	TOGA HAKIM / -	-	-	KAIN	2012	1.3.2.05.002.006.077	7	5.250,00	7	0	0	TOGA HAKIM
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	- / -	-	-	KAIN	2012	1.3.2.05.002.006.077	1	1.000,00	1	0	0	BENDERA MERAH PUTIH
18	Video Mixer	Yamaha Mixer / -	-	-	-	2011	1.3.2.06.001.002.015	1	55.000,00	1	0	0	Spiker
19	Video Effect Generator	ALESIS			BESI	2014	1.3.2.06.001.002.031	1	6.000,00	1	0	0	EFFECK/ECHO SOUND
20	Layar Film/Projector	Layar Proyektor / -	-	-	PLASTIK	2011	1.3.2.06.001.002.105	1	3.000,00	1	0	0	Proyektor



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Jumlah Harga		175.420,00
--------------	--	------------

MENGETAHUI
PI. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002

SEKRETARIS

XX



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : RUANG BENDAHARA

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sepeda Motor	Suzuki Shogun R / -	-	125 CC	Besi Metal Plastik	2008	1.3.2.02.001.004.001	1	13.825,00	1	0	0	HJ ANDI ROSMA (STAF SEKRETARIAT) DD 2304 J
2	Sepeda Motor	YAMAHA / ALL NEW SOUL GT		125	BESI	2017	1.3.2.02.001.004.001	1	18.975,30	1	0	0	WINARNI SURUNG
3	Sepeda Motor	Yamaha Mio Fino Premium / Sepeda Motor Matic OLIVETTI		125	Besi - Plastik	2021	1.3.2.02.001.004.001	1	20.400,00	1	0	0	Bendahara (Kasmawati)
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)				BESI	2006	1.3.2.05.001.001.001	1	1.700,00	0	0	1	
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)	Brother / R 913 DLX	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.001.001	1	1.800,00	1	0	0	Mesin Ketik Manual 13
6	Lemari Besi/Metal	Brother			besi	2019	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Besi
7	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Arsip			Besi	2020	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	LEMARI BESI BENDAHARA (KASMAWATI)
8	Filling Cabinet Besi	BROTHER / -	-	-	BESI	2003	1.3.2.05.001.004.005	2	1.620,00	2	0	0	
9	Filling Cabinet Besi	Brother / -	-	-	BESI	2012	1.3.2.05.001.004.005	1	1.924,32	1	0	0	
10	Brandkas	DRAGON			BESI /TEMBAGA	2003	1.3.2.05.001.004.007	1	2.025,00	1	0	0	
11	Brandkas	DRAGON			BESI BAJA	2008	1.3.2.05.001.004.007	1	3.350,00	0	0	1	Ruang Bendahara ##
12	Meja Kerja Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.002	1	112,50	0	1	0	MEJA KAYU KECIL
13	Meja 1/2 Biro	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	1	144,00	0	0	1	MEJA1/2 BIRO
14	Kursi Putar	-			BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	900,00	0	0	1	KURSI PUTAR BESAR
15	Kursi Putar	PRONTLINE	-	-	BESI BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	650,00	1	0	0	KURSI KOMPUTER
16	Kursi Putar	Activ Km 101			besi Busa	2019	1.3.2.05.002.001.032	1	1.500,00	1	0	0	Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan
17	Meja Komputer	-	-	-	KAYU JATI	2012	1.3.2.05.002.001.039	1	2.405,82	1	0	0	
18	Lemari Es	LG	90SINN60K527		MELAMIN	2019	1.3.2.05.002.004.001	1	2.950,00	1	0	0	KULKAS (RUANG PEMBIAYAAN)
19	A.C. Window	POLITRON			FIBER	2011	1.3.2.05.002.004.003	1	2.971,23	0	0	1	AC
20	A.C. Window	PANASONOC / 1 PK/R410A	CS-LV9RKP		FEBER	2016	1.3.2.05.002.004.003	1	5.000,00	1	0	0	AC (RUANG BENDAHARA)



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

21	Televisi	POLYTRON / LCD		FIBER	2014	1.3.2.05.002.006.002	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
22	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan		Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	2	1.380,00	2	0	0	Kursi Pejabat Ruang Bendahara
23	P.C Unit	KOMPUTER PC / CQ 3623		FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.001	1	9.000,00	1	0	0	
24	P.C Unit	KOMPUTER DESTOP / Core I3	MP1FNAS4	MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.001	1	10.000,00	1	0	0	KOMPUTER PC (DESTOP) RUANG BENDAHARA
25	P.C Unit	Lenovo / Idea Centre AIO 3 22ITL54	MP2172B2	Plastik	2023	1.3.2.10.001.002.001	1	14.758,00	1	0	0	PC Unit ruang Bendahara (Operator / Reza)
26	Lap Top	lenovo		alkari	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	8.500,00	1	0	0	laptop lenovo (widlari)
27	Lap Top	ASUS / ASUS 90NX0231-M0401		Plastik	2020	1.3.2.10.001.002.002	1	18.947,50	1	0	0	LAPTOP BENDAHARA (RITAWATI)
28	Lap Top	Lenovo Core i7 / Laptop	MP22DLRJ	Plastik	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Ritawati
29	Lap Top	LENOVO IDEAPAD I 14AMN7	MP2CSRJC	Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.002	1	9.950,00	1	0	0	Ruang Bendahara (Kasmawati, SAP)
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / -	-	- PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	2.500,00	1	0	0	
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / P1102	VNF8S31734	- Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / L 360	S/N : X3GW497841	- Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	3.500,00	1	0	0	Printer Ruang Staf Bendahara
33	Peralatan Personal Komputer lainnya	Ica 1300 VA / 1300 VA	1C1131300055	- BEST	2013	1.3.2.10.002.003.018	1	1.500,00	1	0	0	
34	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / APC 1100 VA	S/N : 3B1647X15334	- BEST	2017	1.3.2.10.002.003.018	1	2.000,00	1	0	0	RUANG BENDAHARA
Jumlah Harga								197.590,67				

MENGETAHUI
PIL. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG ANGGARAN

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / AVP GX LUSURY R5		1500	Besi	2015	1.3.2.02.001.002.003	1	211,340,00	1	0	0	Nur Sofyansyah (Kabid Anggaran)
2	Sepeda Motor	YAMAHA / ALL NEW SOUL GT		125	BESI	2017	1.3.2.02.001.004.001	1	18.976,30	1	0	0	KASUBID (NUR BAETI)
3	Sepeda Motor	Yamaha / Fazio (Blue Sky)		125	Fiber - Besi	2024	1.3.2.02.001.004.001	1	25,030,00	1	0	0	Kendaraan Dinas Roda 2 Bidang Anggaran (Ulfirah Muthmainnah)
4	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITISEN			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.05.001.002.003	4	618,55	0	0	4	(**)
5	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITISEN			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.05.001.002.003	1	154,64	0	0	1	(**)
6	Lemari Besi/Metal	Wifile / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Arsip Pintu Kaca/Kabid
7	Lemari Besi/Metal	Wifile / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Arsip Pintu Kaca/Staf
8	Lemari Besi/Metal	Wifile / -	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.001.004.001	3	9.000,00	3	0	0	Lemari Besi/Arsip/PINTU KACA
9	Lemari Besi/Metal	brother			besi	2018	1.3.2.05.001.004.001	3	10.500,00	3	0	0	Lemari besi Pintu dorong
10	Lemari Besi/Metal	Brother			besi	2019	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Besi
11	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Arsip			Besi	2020	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	LEMARI BESI ANGGARAN (NURBAETI)
12	Lemari Kayu	KAYU LOKAL			KAYU JATI/KLS I	2012	1.3.2.05.001.004.002	1	3.850,00	1	0	0	
13	Filing Cabinet Besi	BROTHER / -	-	-	BESI	2003	1.3.2.05.001.004.005	1	337,50	1	0	0	
14	Filing Cabinet Besi	WIFILE			BESI	2017	1.3.2.05.001.004.005	1	2.000,00	1	0	0	RUANG ANGGARAN
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-			besi	2018	1.3.2.05.001.005.053	1	1.500,00	1	0	0	layar proyektor
16	Meja Kerja Kayu	adric			kayu lokal	2018	1.3.2.05.002.001.002	6	10.500,00	6	0	0	meja kerja lokal
17	Kursi Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.004	2	189,00	2	0	0	
18	Kursi Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.004	2	189,00	2	0	0	(**)
19	Kursi Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.004	1	94,50	0	0	1	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

20	Meja 1/2 Biro	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	5	5.400,00	5	0	0	MEJA 1/2 BIRO
21	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	2.500,00	1	0	0	MEJA ESELON III
22	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	2	3.000,00	2	0	0	MEJA ESELON IV
23	Kursi Rapat	CHITOSE			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	1	495,00	1	0	0	KURSI BESI
24	Kursi Tamu	KIJANG 321			KAYU BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.031	1	2.100,00	0	0	1	
25	Kursi Putar	CHITASE			BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	2	1.665,00	0	0	2	KURSI PUTAR KECIL
26	Kursi Putar	-			BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	900,00	1	0	0	KURSI PUTAR BESAR
27	Kursi Putar	-			BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	901,88	1	0	0	KURSI PUTAR KECIL
28	Kursi Putar	CHITASE			BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	2	1.665,00	2	0	0	KURSI PUTAR KECIL
29	Kursi Putar	FRONTLINE	-	-	BESI BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	3	1.950,00	3	0	0	KURSI KOMPUTER
30	Kursi Putar	Creative / SANDARAN SEDANG	-	-	BESI BUSA/PLASTIK	2012	1.3.2.05.002.001.032	3	3.000,00	3	0	0	KURSI ESELON IV
31	Kursi Putar	Creative / 101 KD	-	-	BESI BUSA/PLASTIK	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	1.200,00	1	0	0	KURSI 101 KD
32	Kursi Putar	Creative / SANDARAN TINGGI	-	-	BESI BUSA/PLASTIK	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	1.350,00	1	0	0	KURSI ESELON III
33	Kursi Putar	CITOSE			BESI BUSA	2016	1.3.2.05.002.001.032	1	1.000,00	1	0	0	KURSI KERJA SANDARAN SEDANG/Anggaran Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan
34	Kursi Putar	Activ Km 101			besi Busa	2019	1.3.2.05.002.001.032	2	3.000,00	2	0	0	
35	Meja Komputer	KAYU LOKAL			KAYU	2008	1.3.2.05.002.001.039	1	3.000,00	1	0	0	
36	A.C. Window	Panasonic 2 PK	SN : 3425242474	2 PK	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	8.500,00	1	0	0	
37	A.C. Window	Panasonic / R 32	37007483340	2 PK	Fiber	2015	1.3.2.05.002.004.003	1	8.500,00	1	0	0	AC /Ruang Staf
38	A.C. Window	Panasonic / R 32 2 PK	S/N : 1723224555		Fiber	2018	1.3.2.05.002.004.003	1	8.500,00	1	0	0	AC UNIT
39	A.C. Split	AC Polytron / Ac Split	A0A W84F03978	1 PK	Plastik Fiber	2024	1.3.2.05.002.004.004	1	7.000,00	1	0	0	Ac Bidang Anggaran
40	A.C. Split	Ac Polytron / Ac Split	A0A W84F04022	1 PK	Plastik Fiber	2024	1.3.2.05.002.004.004	1	7.000,00	1	0	0	Ac Bidang Anggaran
41	Kompas Gas (Alat Dapur)	Rinnai / 522	-	-	Besi	2015	1.3.2.05.002.005.002	1	500,00	1	0	0	Kompas Gas + Regulator
42	Tabung Gas	Pertamina / 3 KG	Pertamina	3 KG	Besi	2015	1.3.2.05.002.005.009	1	500,00	1	0	0	Tabung Gas
43	Televisi	POLYTRON / LCD			FIBER	2014	1.3.2.05.002.006.002	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	ORBIT			SERBUK /BESI	2016	1.3.2.05.003.001.006	1	2.500,00	1	0	0	MEJA 1/2 BIRO/Anggaran
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	actic			besi busa	2018	1.3.2.05.003.003.006	10	16.000,00	10	0	0	
46	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	2	1.380,00	2	0	0	Kursi Pejabat Bidang Anggaran
47	Layar Film/Projector	panasonic				2018	1.3.2.06.001.002.105	1	8.500,00	1	0	0	
48	P.C Unit	levono	S/N : SIH04QTL		fiber	2018	1.3.2.10.001.002.001	1	9.700,00	1	0	0	komputer Destop (Staf Anggaran)
49	Lap Top	SONY VAIO / -	54510901000374	-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.002	1	7.000,00	1	0	0	
50	Lap Top	TOSHIBA / L475		-	FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.002	1	9.917,00	1	0	0	
51	Lap Top	Sony Vaio / SVS13137PPG	SN : 54526567 0000139	-	FIBER	2013	1.3.2.10.001.002.002	1	17.000,00	1	0	0	
52	Lap Top	Sony Vaio SVF14218SGW / SVF14218SGW	SN : 54580067 0001541	-	FIBER	2013	1.3.2.10.001.002.002	1	11.500,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

53	Lap Top	Sony Vaio SVF14218SGW	SN : 54580067 0001559	RAM 4 GB DDR3	FIBER	2013	1.3.2.10.001.002.002	1	11.500,00	1	0	0	
54	Lap Top	LENOVO	YB06645744/MTM59 434429		FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.002	1	14.200,00	1	0	0	
55	Lap Top	LENOVO / 20366	YB10362625		- FIBER	2015	1.3.2.10.001.002.002	1	18.000,00	1	0	0	LAPTOP
56	Lap Top	LENOVO / 20366	YB10363780		- FIBER	2015	1.3.2.10.001.002.002	1	17.760,00	1	0	0	LAPTOP
57	Lap Top	DELL INSPIRON / 14 5447	7H4QH22		-	2015	1.3.2.10.001.002.002	1	15.000,00	1	0	0	LAPTOP/KABID
58	Lap Top	DELL CORE I5 / Core i5	BMDHW82		FIBER	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	15.000,00	1	0	0	LAPTOP (ANGGARAN SUDIRMAN)
59	Lap Top	lenovo / 1,5	PFOEIBC7		feber	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	AKUNTANSI/SULFAD LI
60	Lap Top	HP / i5-6200 RTL8723BE	S/N : CNDG325GH4		FIBER	2017	1.3.2.10.001.002.002	1	15.000,00	1	0	0	LAPTOP (KABID ANGGARAN) WAHYUNINGSI
61	Lap Top	lenovo			fiber	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	laptop (Ahmad Djunardi)
62	Lap Top	lenovo			fiber	2018	1.3.2.10.001.002.002	1	30.000,00	1	0	0	laptop (Nursopyansyah)
63	Lap Top	HP	8CG93577RY		melamin	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	25.000,00	0	0	1	Laptop Bidang Anggaran (Sri Wahyuningsih)
64	Lap Top	HP	8CG93518N8		melamin	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	25.000,00	1	0	0	Laptop Bidang Anggaran (Andi Ramla)
65	Lap Top	HP	8CG935702Y		melamin	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	25.000,00	1	0	0	Laptop Bidang Anggaran (Nur Sofyansyah)
66	Lap Top	Lenovo Core i 7 / Laptop	MP22BBC4		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Anggaran (Ulfira)
67	Lap Top	-	MP22DM75		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Anggaran
68	Note Book	-				2010	1.3.2.10.001.002.003	1	10.000,00	0	1	0	
69	Tablet PC	Samsung / Galaxy S10 Plus	SM-X826B01		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.009	1	23.950,00	1	0	0	Tablet Bidang Anggaran (Nur Sofyansyah)
70	Tablet PC	Samsung / Galaxy S10 Plus	SM-X826B01		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.009	1	23.950,00	1	0	0	Tablet Bidang Anggaran (Ulfira Muthmainnah)
71	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	EPSON	S/N : A01BC43610		FIBER	2018	1.3.2.10.002.002.009	1	5.000,00	1	0	0	
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP			PLASTIK FIBER	2010	1.3.2.10.002.003.003	1	1.441,82	1	0	0	
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 258			- PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	3	3.840,20	3	0	0	
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	L JET 1102			PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	1.140,20	1	0	0	
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 350	Q8FK060501		-	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	3.562,50	1	0	0	Printer Scanner/R,KABID
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / P1102	VNF7C93233		-	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer HP Laser Jet
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / P1102	VNC3L42000		-	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer HP Laser Jet
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / P1102	VNF4Y48088		- Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / P1102	VNF8R40332		- Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360			Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	2	7.250,00	2	0	0	
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Office Jet Pro 7740	CN09C55003		Plastik	2020	1.3.2.10.002.003.003	1	9.432,50	1	0	0	PRINTER BIDANG ANGGARAN
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu / F7140	AMS5A354551		Plastik	2020	1.3.2.10.002.003.004	1	20.234,50	1	0	0	BIDANG ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

83	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / -	-	-	BESI	2012	1.3.2.10.002.003.018	2	9.250,00	1	1	0	
84	Peralatan Personal Komputer lainnya	POWER UP / UPS -1200 VA	-		Besi	2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS
85	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA			besi	2018	1.3.2.10.002.003.018	1	3.500,00	1	0	0	
86	Server	- / -	-	-	-	2012	1.3.2.10.002.004.001	1	15.500,00	1	0	0	SQL
87	Peralatan Komputer lainnya	HP 107 A / Printer Laserjet	CNB2P30HPS		Plastik	2021	1.3.2.10.002.005.001	1	2.500,00	1	0	0	Printer Laserjet Bidang Anggaran
88	Peralatan Komputer lainnya	HP 107A / Printer Laserjet	CNB2P30JBQ		Plastik	2021	1.3.2.10.002.005.001	1	2.500,00	1	0	0	Printer Laserjet Bidang Anggaran
Jumlah Harga									892.615,07				

MENGETAHUI
Pit. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG AKUNTANSI

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITIZEN			PLASTIK	2011	1.3.2.05.001.002.003	1	165,68	0	0	1	
2	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITIZEN			PLASTIK	2011	1.3.2.05.001.002.003	1	154,64	0	0	1	(**)
3	Lemari Besi/Metal	Brother			besi	2019	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	0 Lemari Besi
4	Lemari Kayu	KAYU LOKAL			KAYU JATI	2012	1.3.2.05.001.004.002	1	1.350,00	1	0	0	0 LEMARI KAYU ARSIP PENDEK
5	Lemari Kayu	KAYU LOKAL			KAYU JATI	2012	1.3.2.05.001.004.002	1	3.850,00	1	0	0	0 LEMARI KAYU TINGGI
6	Lemari Kaca	WIFILE			BESI /KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	3	10.500,00	3	0	0	0 RUANG AKUNTANSI
7	Alat Kantor Lainnya	-			BESI PLAT	2012	1.3.2.05.001.005.088	1	1.500,00	0	0	1	1 PAPAN REKLAME PBB
8	Kursi Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.004	2	189,00	2	0	0	0
9	Meja 1/2 Biro	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	8	8.167,50	8	0	0	0 MEJA 1/2 BIRO
10	Meja 1/2 Biro	OLIMPI / -	-	-	SERBUK	2007	1.3.2.05.002.001.024	4	2.250,00	4	0	0	0 MEJA 1/2 BIRO
11	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	2.500,00	0	0	1	1 MEJA ESELON III
12	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	2	3.000,00	2	0	0	0 MEJA ESELON IV
13	Kursi Rapat	CHITOSE			BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	15	7.425,00	15	0	0	0 KURSI BESI
14	Kursi Tamu	Slantaro / 3.1.1	-	-	KAYU KELAS I	2015	1.3.2.05.002.001.031	1	5.000,00	1	0	0	0 Kursi Tamu(RUANG KABID)
15	Kursi Putar	Creative / SANDARAN TINGGI	-	-	BESI	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	1.350,00	1	0	0	0 KURSI ESELON III
16	Kursi Putar	Creative / SANDARAN SEDANG	-	-	BESI	2012	1.3.2.05.002.001.032	3	3.000,00	3	0	0	0 KURSI ESELON IV
17	Meja Komputer	KAYU LOKAL / -	-	-	KAYU	2007	1.3.2.05.002.001.039	2	3.000,00	2	0	0	0 MEJA KOMPUTER
18	Meja Komputer	KAYU LOKAL	-	-	KAYU JATI	2012	1.3.2.05.002.001.039	1	1.500,00	1	0	0	0
19	A.C. Window	PANASONIC		1.5 PK	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.05.002.004.003	1	7.075,00	1	0	0	0
20	A.C. Window	Panasonic 1 PK / -	SN : 6632662287	1 PK	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	4.500,00	1	0	0	0
21	A.C. Window	Sharp / 1 PK	50533 AH-A9NCY	-	Fiber	2015	1.3.2.05.002.004.003	1	4.000,00	1	0	0	0 AC/Verifikasi
22	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	SN :14065531615		PLASTIK FIBER	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	4.400,00	1	0	0	0 RUANG AKUNTANSI (STAF)
23	A.C. Window	Panasonic / R 32 1 PK	S/N : 1723224555		fiber	2018	1.3.2.05.002.004.003	1	4.500,00	1	0	0	0 AC UNIT



PEMERINTAH KABUPATEN SELAT

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

24	A.C. Split	Panasonic / Air Conditioner	SN 340D4200701152601 31581	1 PK	Plastik	2021	1.3.2.05.002.004.004	1	5.500,00	1	0	0	AC Ruang Akuntansi
25	A.C. Split	Daikin / AC Split	E724900	1/2 PK	Plastik Fiber	2024	1.3.2.05.002.004.004	1	6.725,00	1	0	0	Ac Bidang Akuntansi
26	A.C. Split	AC Daikin / Ac Split	E724944	1/2 PK	Plastik Fiber	2024	1.3.2.05.002.004.004	1	6.725,00	1	0	0	AC Bidang Akuntansi
27	Televisi	SAMSUNG / LCD			FIBER	2014	1.3.2.05.002.006.002	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
28	Meja Kerja Pejabat Eselon V	OPUS			SERBUK	2016	1.3.2.05.003.001.007	1	1.000,00	1	0	0	MEJA 1/2 BIDRO/Akuntansi
29	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	1	690,00	1	0	0	Kursi Pejabat Ruang Akuntansi
30	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	1	690,00	1	0	0	Kursi Pejabat Bidang Akuntansi
31	P.C Unit	HP			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.10.001.002.001	2	18.998,18	2	0	0	
32	P.C Unit	HP			FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.001	2	18.881,82	2	0	0	
33	P.C Unit	LG			FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.001	2	19.000,00	2	0	0	
34	Lap Top	Lenovo			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.002	1	9.499,09	1	0	0	
35	Lap Top	ASER ASPIRA / 4750			FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.002	2	19.992,40	2	0	0	
36	Lap Top	ACES ASPIRA / V3 371 I5	NOMPGS00243410C 1166		-	2015	1.3.2.10.001.002.002	1	9.000,00	1	0	0	LAPTOP/BASNIATY
37	Lap Top	lenovo / i,5	PFOE1HTL		feber	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	AKUNTANSI/NUR AHMAD AFANDI
38	Lap Top	AZUS	S/N : K8NRCV03TS33344		MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	21.196,17	1	0	0	LAPTOP AKUNTANSI AHMAD AFANDI
39	Lap Top	LENOVO / NB MSI GL65 95C	K2003N0069270		Plastik	2020	1.3.2.10.001.002.002	1	19.973,80	1	0	0	LAPTOP BIDANG AKUNTANSI
40	Lap Top	Lenovo Core i7 / Laptop	MP22G9TN		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Akuntansi (Andi Jusman)
41	Note Book	TOSHIBA			FEBER	2009	1.3.2.10.001.002.003	1	7.833,00	0	0	1	NOTE BOOK ##
42	Note Book	Asus Expertbook B3	R1NKNZG04943426		Plastik Fiber	2023	1.3.2.10.001.002.003	1	10.066,00	1	0	0	Include With Keyboard and USB Type C Hub (Kabid Akuntansi)
43	Tablet PC	Samsung / Galaxy S10 Plus	SM-X826B01		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.009	1	23.950,00	1	0	0	Tablet Bidang Akuntansi
44	Peralatan Minikomputer lainnya	Sandisk / Flashdisk		320 GB	plastik	2021	1.3.2.10.002.002.017	1	250,00	1	0	0	Flashdisk (Nursal Ikhsan)
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp P 1102 / P 1102			PLASTIK FIBER	2011	1.3.2.10.002.003.003	1	1.568,46	0	0	1	
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma 287 / MP 287			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.10.002.003.003	2	2.430,00	0	0	2	(**)
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LJET / L 800			FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	4.440,00	0	0	1	(**)
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LQ 300			FEBIR	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	2.950,00	1	0	0	
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / L JET 1102			FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	2.110,00	1	0	0	
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / L100			PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	1.500,00	1	0	0	
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother CP-T420 DCP T420 Original MUST	EB0718N3N244024		Plastik	2024	1.3.2.10.002.003.003	1	3.250,00	1	0	0	Bidang Akuntansi
52	Peralatan Personal Komputer lainnya		EP300001512020180 3170012		Besi	2019	1.3.2.10.002.003.018	1	10.000,00	1	0	0	UPS Akuntansi
53	Peralatan Komputer lainnya	Laserjet 103A / Printer Laserjet	CNS3PB4KFI		Plastik	2021	1.3.2.10.002.005.001	1	2.950,00	1	0	0	Printer Laserjet Bidang Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

		Jumlah Harga	348.545,74	
--	--	--------------	------------	--

MENGETAHUI
PIL. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG PEMBIAYAAN

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sepeda Motor	Yamaha / Grand Filiano (Poach)		125	Fiber - Besi	2024	1.3.2.02.001.004.001	1	29.650,00	1	0	0	Kendaraan Dinas Roda 2 Bidang Pembiayaan (Jufri Nur)
2	Sepeda Motor	Yamaha / Mio M3 (Red-Black)		125	Fiber - Besi	2024	1.3.2.02.001.004.001	1	20.470,00	1	0	0	Kendaraan Dinas Roda 2 Bidang Pembiayaan (Rafika Widadayanti)
3	Lemari Besi/Metal	Brother			besi	2019	1.3.2.05.001.004.001	1	3.500,00	1	0	0	Lemari Besi
4	Lemari Kaca	WIFILE			BEST/KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	1	3.500,00	1	0	0	RUANG PEMBIAYAAN
5	Kursi Tamu	-			KAYU	2017	1.3.2.05.002.001.031	1	5.000,00	1	0	0	RUANG PEMBIAYAAN (KABID)
6	Kursi Putar	CITDSE			BEST BUSA	2016	1.3.2.05.002.001.032	2	2.000,00	2	0	0	KURSI KERJA SANDARAN SEDANG/Pembiayaan RUANG
7	Kursi Putar	FRONLINE			BEST BUSA	2017	1.3.2.05.002.001.032	1	1.500,00	1	0	0	Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan KULKAS (RUANG PEMBIAYAAN)
8	Kursi Putar	Activ Km 101	90SINU80K526		besi Busa	2019	1.3.2.05.002.001.032	3	4.500,00	3	0	0	AC (RUANG PEMBIAYAAN)
9	Lemari Es	LG	17291608687		MELAMIN	2019	1.3.2.05.002.004.001	1	2.950,00	1	0	0	AC 1/2 PK Panasonic Bidang Pembiayaan (Ruang Kabid)
10	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	4126500562		MELAMIN	2019	1.3.2.05.002.004.003	1	5.300,00	1	0	0	RUANG PEMBIAYAAN (STAF)
11	A.C. Split	Panasonic / Ac Split	S/N : TH-32D302G034300		Plastik, Besi	2023	1.3.2.05.002.004.004	1	5.500,00	1	0	0	MEJA BIRO/Pembiayaan
12	Televisi	PANASONIC			FIBER	2017	1.3.2.05.002.006.002	1	3.250,00	1	0	0	MEJA 1/2 BIRO/Pembiayaan
13	Meja Kerja Pejabat Eselon III	PRODESIGN			SERBUK/BESI	2016	1.3.2.05.003.001.005	1	5.000,00	1	0	0	Kursi Pejabat Bidang Pembiayaan
14	Meja Kerja Pejabat Eselon V	OPUS			SERBUK	2016	1.3.2.05.003.001.007	2	2.000,00	2	0	0	Generator Set Bidang Pembiayaan
15	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	2	1.380,00	2	0	0	
16	Genset	Pro Quip / Generator Set			Besi	2023	1.3.2.06.003.047.002	1	20.000,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

17	P.C Unit	KOMPUTER DESTOP / Core i3	MP1FMCBM	MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.001	1	10.000,00	1	0	0	KOMPUTER PC (DESTOP) RUANG PEMBIAYAAN
18	Lap Top	lenovo / i5	PFOE17GT	fiber	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	Ruang Bendahara/ Fitriani
19	Lap Top	Lenovo / Ideapad Core i5-1135G7	PF3CMPKA	Plastik	2023	1.3.2.10.001.002.002	1	10.020,00	1	0	0	Laptop lenovo Ideapad Bidang Pembiayaan (Rafika)
20	Tablet PC	Samsung / Galaxy S10 Plus	SM-X826B01	Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.009	1	23.950,00	1	0	0	Tablet Bidang Pembiayaan (Zulfadli)
21	Tablet PC	Samsung / Galaxy 10 S Plus	SM-X826B05	Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.009	1	23.950,00	1	0	0	Tablet Bidang Pembiayaan (Jufti Nur)
22	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Dazumba / CORE i3	-	- Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.001	1	5.000,00	1	0	0	CPU/Verifikasi
23	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Dazumba / Core i5	-	- Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.001	1	6.000,00	1	0	0	CPU/Verifikasi
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ 2190	*MK4Y127259*	Fiber	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	8.500,00	1	0	0	Printer LQ 2190/Verifikasi
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360	*X3GW034142*	FIBER	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	3.000,00	1	0	0	RUANG PEMBIAYAAN
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dotmatrix / L 2190	MK4Y168772	PLASTIK FIBER	2019	1.3.2.10.002.003.003	1	10.000,00	1	0	0	PRINTER (RUANG PEMBIAYAAN)
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 350	XSDX141368	PLASTIK FIBER	2019	1.3.2.10.002.003.003	1	3.500,00	1	0	0	PRINTER (RUANG PEMBIAYAAN)
28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu	A01BC94100	MELAMIN	2019	1.3.2.10.002.003.004	1	5.000,00	1	0	0	SCANNER (RUANG PEMBIAYAAN)
29	Peralatan Personal Komputer lainnya	POWER UP / UPS - 1200 VA	BA MAX	Besi	2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS/VERIFIKASI
30	Peralatan Personal Komputer lainnya	I C A	121GY1902021	MELAMIN	2019	1.3.2.10.002.003.018	1	3.250,00	1	0	0	UPS (RUANG PEMBIAYAAN)
31	Peralatan Personal Komputer lainnya	I C A	IJHR2002239	MELAMIN	2019	1.3.2.10.002.003.018	1	3.250,00	1	0	0	UPS BIDANG PEMBIAYAAN
Jumlah Harga								241.920,00				

MENGETAHUI

KEPALA BPKPAD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

PENGURUS BARANG

ANDI ADHYATMA, S.E

NIP. 19900304 201503 1 002

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

ZULFADLI, S.E

NIP. 19780612 200604 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG ASET

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota AVANZA / -	-	1298 CC	Besi Metal Plastik	2011	1.3.2.02.001.002.003	1	157.000,00	1	0	0	ANDI ARWIS (KABID ASET)
2	Sepeda Motor	Honda Win/MCB / WIN	-	97 CC	BESI	1995	1.3.2.02.001.004.001	1	2.700,00	0	0	1	Kendaraan Lapangan DD 2096 J
3	Sepeda Motor	Suzuki A100	-	100 CC		1996	1.3.2.02.001.004.001	1	3.150,00	0	0	1	DOBOL PENCATATAN
4	Sepeda Motor	Suzuki A100 / A 100	-	100 CC	BESI	1996	1.3.2.02.001.004.001	1	2.700,00	0	0	1	DI GUDANG
5	Sepeda Motor	Honda Win / WIN	-	97 CC	Besi Metal Plastik	1997	1.3.2.02.001.004.001	1	3.375,00	0	0	1	GUDANG / RB
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	CITISEN	-	-	PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.05.001.002.003	4	526,21	0	0	4	(**)
7	Filing Cabinet Kayu	- / -	-	-	KAYU LOKAL	1994	1.3.2.05.001.004.006	1	168,75	1	0	0	
8	Brandkas	Uchida / -	2012022887	-	BESI BAJA	2013	1.3.2.05.001.004.007	1	37.000,00	1	0	0	
9	Brandkas	CAPSTONE	-	-	BESI	2017	1.3.2.05.001.004.007	1	49.500,00	1	0	0	RUANG ASET (STAF)
10	Lemari Kaca	WIFILE	-	-	BESI /KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	1	3.500,00	1	0	0	RUANG ASET
11	Meja 1/2 Biro	-	-	-	KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	6	5.940,00	6	0	0	MEJA 1/2 BIRO
12	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	2.500,00	1	0	0	MEJA ESELON III
13	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	1.500,00	1	0	0	MEJA ESELON IV
14	Kursi Rapat	CHITOSE	-	-	BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	3	1.485,00	3	0	0	KURSI BESI
15	Kursi Tamu	-	-	-	KAYU	2017	1.3.2.05.002.001.031	1	5.000,00	1	0	0	RUANG ASET (KABID)
16	Kursi Putar	-	-	-	BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	901,88	1	0	0	KURSI PUTAR KECIL
17	Kursi Putar	CHITASE	-	-	BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	2	1.665,00	2	0	0	KURSI PUTAR KECIL
18	Kursi Putar	CHITASE	-	-	BESI BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	4	3.330,00	0	0	4	KURSI PUTAR KECIL
19	Kursi Putar	Creative / SANDARAN SEDANG	-	-	BESI BUSA/PLASTIK	2012	1.3.2.05.002.001.032	2	2.000,00	2	0	0	KURSI ESELON IV
20	Kursi Putar	PRONTLINE	-	-	BESI BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	650,00	0	0	1	KURSI KOMPUTER
21	Kursi Putar	PRONTLINE	-	-	BESI BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	650,00	0	0	1	KURSI KOMPUTER##
22	Kursi Putar	Activ Km 101	-	-	besi Busa	2019	1.3.2.05.002.001.032	3	4.500,00	3	0	0	Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

23	Meja Komputer	KAYU LOKAL	-	-	KAYU JATI	2012	1.3.2.05.002.001.039	1	1.500,00	1	0	0	
24	Jam Mekanis	-			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.05.002.002.001	2	126,07	2	0	0	JAM DINDING
25	A.C. Window	PANASONIC		2 PK	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.05.002.004.003	1	7.575,00	1	0	0	
26	A.C. Window	PANASONIC / 2 PK	CU-YN18TKP		MELAMIN	2019	1.3.2.05.002.004.003	1	8.500,00	1	0	0	AC (RUANG ASET)
27	A.C. Split	Panasonic / Air Conditioner	SN.340B6394703142 90130413	1 PK	Plastik	2021	1.3.2.05.002.004.004	1	5.500,00	1	0	0	AC Bidang Aset
28	Televisi	POLYTRON / LCD			FIBER	2014	1.3.2.05.002.006.002	1	4.500,00	1	0	0	TELEVISI
29	Meja Kerja Pejabat Eselon V	F				2017	1.3.2.05.003.001.007	2	3.000,00	2	0	0	RUANG ASET (STAF)
30	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	2	1.380,00	2	0	0	Kursi Pejabat Bidang Aset
31	Camera Digital	Sony / -	-	-	PLASTIK FIBER	2003	1.3.2.06.001.002.126	1	10.965,00	0	0	1	HandyCam
32	Lap Top	Acer Aspire 4755			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.002	1	8.500,00	1	0	0	
33	Lap Top	TOSHIBA			FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.002	1	9.388,64	1	0	0	
34	Lap Top	TOSHIBA / L475		-	FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.002	2	19.834,00	2	0	0	
35	Lap Top	Toshiba / M840	SN : XNC094728C	-	FIBER	2013	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	
36	Lap Top	Toshiba / M 840	SN : YC122566C	-	FIBER	2013	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	
37	Lap Top	LENOVO CORE I5 / CORE I5	PT0NMQBW		FIBER	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	8.000,00	1	0	0	LAPTOP (Staf ASET)
38	Lap Top	lenovo / I,5	PFOE04Y7		feber	2016	1.3.2.10.001.002.002	1	10.000,00	1	0	0	ASET/TAUFIT
39	Lap Top	DELL / Core I7	CDQ43P2		MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	14.500,00	1	0	0	LAPTOP (KABID ASET)
40	Lap Top	Lenovo Core I7 / Laptop	MP22B2J1		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Aset (Sri Resky Wardani)
41	Lap Top	Lenovo Core I7 / Laptop	MP22DLVA		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Aset (Nur Ikhsan Chairuddin)
42	Lap Top	Lenovo Core I7 / Laptop	MP22GAGD		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Aset (Wahid)
43	Lap Top	Lenovo Core I7 / Laptop	MP22GCJW		Plastik Fiber	2021	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	Laptop Aset (Arman)
44	Lap Top	Lenovo / Thinkpad X1 Nano Carbon	PW006JVJ		Fiber	2024	1.3.2.10.001.002.002	1	19.900,00	1	0	0	Laptop Bidang Aset (Muhammad Akbar)
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	FUJI XEROX / L JET			FIBER	2007	1.3.2.10.002.003.003	1	2.300,00	0	0	1	(**)
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L120	TP2K26S657		FEBER	2016	1.3.2.10.002.003.003	1	2.000,00	1	0	0	PRINTER (RUANG ASET)
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASER JET 102	CDSE		FIBER	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	2.000,00	1	0	0	PRINTER RUANG ASET
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 200			Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	2.600,00	1	0	0	
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360			Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	2.600,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Jumlah Harga		534,410,55
--------------	--	------------

MENGETAHUI
PIL. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024
Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si
NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S,E
NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG PENDAPATAN

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Registrar	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sepeda Motor	Honda Supra/NF 100 D / NF 100 D	-	100 CC	Besi Metal Plastik	2002	1.3.2.02.001.004.001	1	11.912,50	1	0	0	ADE PUTRA SP (KENDARAAN LAPANGAN) DD 2160 J
2	Sepeda Motor	Suzuki Shogun R / -	-	125 CC	Besi Metal Plastik	2008	1.3.2.02.001.004.001	1	14.910,00	1	0	0	ARIFUDDIN (KENDARAAN LAPANGAN) DD 2302 J
3	Sepeda Motor	Suzuki Shogun RR / -	-	125 CC	Besi Metal Plastik	2009	1.3.2.02.001.004.001	1	14.360,00	1	0	0	HJ. SAMSIA S Sos DD 3196 J
4	Sepeda Motor	YAHAMA / VEGA RR	-	125 CC	BESI	2015	1.3.2.02.001.004.001	1	15.851,00	1	0	0	Suandi S.Sos (STAF BID PENDAPATAN)
5	Sepeda Motor	YAMAHA / ALL NEW SOUL	-	125	BESI	2017	1.3.2.02.001.004.001	1	18.976,30	1	0	0	IKHSAN (STAF PENDAPATAN)
6	Sepeda Motor	GT Yamaha Mio Fino Premium / Sepeda Motor Matic	-	125	Besi - Plastik	2021	1.3.2.02.001.004.001	1	20.400,00	1	0	0	Pendapatan (Asri Ansar)
7	Sepeda Motor	Yamaha Mio Fino Premium / Sepeda Motor Matic	-	125	Plastik -- Besi	2021	1.3.2.02.001.004.001	1	20.400,00	1	0	0	FITRI OPU LEWA (STAF BIDANG PENDAPATAN)
8	Sepeda Motor	Yamaha N Max 155 Standard Version / Sepeda Motor Matic	-	155	Plastik - Besi	2021	1.3.2.02.001.004.001	1	32.250,00	1	0	0	Pendapatan (Andi Rumbiyah)
9	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	-	-	PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.05.001.002.003	4	353,46	0	0	4	CALCULATOR
10	Lemari Besi/Metal	BROTHER 303	-	-	BESI	2014	1.3.2.05.001.004.001	1	3.000,00	1	0	0	-
11	Lemari Besi/Metal	BROTHER 304	-	-	BESI	2014	1.3.2.05.001.004.001	1	3.000,00	1	0	0	-
12	Lemari Kayu	-	-	-	KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.001.004.002	1	371,25	1	0	0	-
13	Lemari Kayu	KAYU LOKAL	-	-	KAYU JATI	2012	1.3.2.05.001.004.002	1	1.350,00	1	0	0	LEMARI KAYU ARSIP PENDEK
14	Filling Cabinet Kayu	KAYU LOKAL / -	-	-	KAYU	1994	1.3.2.05.001.004.005	5	562,50	5	0	0	-
15	Lemari Kaca	WTFLE	-	-	BESI /KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	2	7.000,00	2	0	0	RUANG PENDAPATAN
16	Perforator Besar	-	-	-	BESI	2000	1.3.2.05.001.005.021	1	675,00	0	0	1	PERFORASI BESAR ##
17	Perforator Besar	Galle Perforator / Mesin perforator Elektrik	-	-	Besi / Baja	2022	1.3.2.05.001.005.021	1	29.970,00	1	0	0	-



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

18	Meja Kerja Kayu	FRONTLINE			BEST BUSA	2014	1.3.2.05.002.001.002	2	2.600,00	2	0	0	KURSI KERJA
19	Meja Kerja Kayu	CREATIV			BEST BUSA	2014	1.3.2.05.002.001.002	1	1.450,00	0	0	1	KURSI KERJA
20	Kursi Kayu	-			KAYU LOKAL	2003	1.3.2.05.002.001.004	5	472,50	5	0	0	
21	Meja 1/2 Biro	-			KAYU	2003	1.3.2.05.002.001.024	7	7.560,00	7	0	0	MEJA 1/2 BIRO
22	Meja 1/2 Biro	ACTIV			SERBUK	2014	1.3.2.05.002.001.024	1	1.460,00	1	0	0	MEJA BIRO
23	Meja 1/2 Biro	ACTIV			SERBUK	2014	1.3.2.05.002.001.024	3	3.600,00	3	0	0	MEJA 1/2 BIRO
24	Kursi Rapat	CHITOSE			BEST BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	13	6.435,00	13	0	0	KURSI BEST
25	Kursi Tamu	-			KAYU	2017	1.3.2.05.002.001.031	1	5.000,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN (KABID)
26	Kursi Putar	CHITASE			BEST BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	4	3.330,00	0	0	4	KURSI PUTAR KECIL
27	Kursi Putar	-			BEST BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	900,00	1	0	0	KURSI PUTAR BESAR
28	Kursi Putar	CHITASE			BEST BUSA	2003	1.3.2.05.002.001.032	1	832,50	1	0	0	KURSI PUTAR KECIL
29	Kursi Putar	FRONTLINE	-	-	BEST BUSA	2012	1.3.2.05.002.001.032	1	650,00	0	0	1	KURSI KOMPUTER SANDARAN TANGAN##
30	Kursi Putar	Creative / SANDARAN SEDANG	-	-	BEST BUSA/PLASTIK	2012	1.3.2.05.002.001.032	2	2.000,00	2	0	0	KURSI ESELON IV
31	Kursi Putar	Actv Km 101			best Busa	2019	1.3.2.05.002.001.032	4	6.000,00	4	0	0	Kursi putar Sandaran Sedang Pakai Lengan
32	Meja Komputer	-	-	-	SERBUK	1996	1.3.2.05.002.001.039	2	315,00	2	0	0	
33	Lemari Es	SHARP			FIBER	2011	1.3.2.05.002.004.001	1	1.380,68	1	0	0	
34	A.C. Window	-			FIBER	2011	1.3.2.05.002.004.003	1	4.252,50	1	0	0	
35	A.C. Window	Panasonic / 1PK	SN :6633376689	-	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	3.594,20	1	0	0	
36	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	SN : 14065531845		PLASTIK FIBER	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	4.400,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN (STAF)
37	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	SN : 14065531947		PLASTIK FIBER	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	4.400,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN (KABID)
38	A.C. Window	PANASONIC / 2 PK	SN : 373660711		PLASTIK FIBER	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	8.250,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN (STAF)
39	Televisi	LG / 32"	SN :310INXJ68649	-	FIBER	2013	1.3.2.05.002.006.002	1	3.500,00	1	0	0	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Active / Meja & Kursi			Kayu Serbuk	2021	1.3.2.05.003.001.005	1	7.038,00	1	0	0	Meja & Kursi Kabid Pendapatan
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	CREATIV			BEST/BUSA	2014	1.3.2.05.003.003.005	1	1.700,00	1	0	0	KURSI PUTAR
42	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Informa / Zidan			Plastik - Besi	2024	1.3.2.05.003.004.008	2	1.380,00	2	0	0	Kursi Pejabat Bidang Pendapatan
43	Camera Digital	Nikon D3500 / Camera Digital	8210773		Plastik	2021	1.3.2.06.001.002.126	1	3.100,00	1	0	0	Camera Digital Bidang Pendapatan
44	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	-			BESI	2011	1.3.2.06.001.004.019	1	59.790,00	1	0	0	
45	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	JHP-326 / ELITRIK DAN MANUAL	HG		BESI	2017	1.3.2.06.001.004.019	1	66.965,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN
46	Lap Top	ACER ASPIRA			FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.002	1	4.997,00	1	0	0	
47	Lap Top	ACER ASPIRA V5			FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.002	1	4.997,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

48	Lap Top	LENOVO	S/N : H30CV0115710		2017	1.3.2.10.001.002.002	1	20.000,00	1	0	0	RUANG PENDAPATAN (DJAMRUK FAULA LATIF)
49	Lap Top	AZUS	S/N : K9N0CV15320939A	MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	10.598,09	1	0	0	LAPTOP PENDAPATAN ASRI ANSAR
50	Lap Top	AZUS	S/N : K9N0CV153252399	MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	10.598,09	1	0	0	LAPTOP PENDAPATAN HJ APRIANA
51	Note Book	ACER	NXMSN00144412969 7600	FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.003	1	5.000,00	1	0	0	NOTE BOOK
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP L JET		PLASTIK FIBER	2011	1.3.2.10.002.003.003	1	2.850,00	0	0	1	3 unit
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L110	RBK164714	FIBER	2014	1.3.2.10.002.003.003	1	2.295,00	1	0	0	
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET P 1102	RBK164714	FIBER	2014	1.3.2.10.002.003.003	1	1.620,00	1	0	0	
55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON MG 2570	KJAB86305	FIBER	2014	1.3.2.10.002.003.003	1	1.060,00	1	0	0	
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX310	Q7FY100018	FIBER	2014	1.3.2.10.002.003.003	1	3.105,00	1	0	0	
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ 2190	MK4Y103715	-	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	8.500,00	1	0	0	Printer Dot Matrix/STAF
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / P1102	VNF5541064	-	2015	1.3.2.10.002.003.003	1	1.800,00	1	0	0	Printer Laser Jet
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360		Fiber	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	2.600,00	1	0	0	
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	S/N : VJMY 089119	MELAMIN	2019	1.3.2.10.002.003.003	1	5.000,00	1	0	0	PRINTER PENDAPATAN
61	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA	IJTHR1400743		2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS
62	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / -	IJTHR1400577	-	2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS
63	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / -	IJTHR1400578	-	2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS
64	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / -	IJTHR1400744	-	2015	1.3.2.10.002.003.018	1	1.000,00	1	0	0	UPS
Jumlah Harga								496.677,56				

MENGETAHUI
Prt. KEPALA BPKPD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
U P B : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ruangan : BIDANG PBB-P2

NO. KODE LOKASI : 12.22.13.13.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang 1.3.	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Automatic Distortion Meter	Distrometer / -	1350360941	-	-	2015	1.3.2.03.003.001.027	1	5.000,00	1	0	0	Alat ukur
2	Automatic Distortion Meter	Distrometer / -	1350360805	-	Plastik Fiber	2015	1.3.2.03.003.001.027	1	5.000,00	1	0	0	
3	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	-	BESI	2013	1.3.2.05.001.004.005	4	7.200,00	4	0	0	
4	Lemari Kaca	WIFILE	-	-	BESI /KACA	2017	1.3.2.05.001.004.027	2	7.000,00	2	0	0	RUANG PBB-P2
5	Meja Kerja Besi/Metal	-	-	-	Kain Serat	2017	1.3.2.05.002.001.001	1	160,00	1	0	0	Gorden (Ruang PBB-P2)
6	Meja Kerja Kayu	Kreativ / -	-	-	BESI BUSA	2013	1.3.2.05.002.001.002	7	10.500,00	7	0	0	Meja kerja
7	Meja Kerja Kayu	Activ Gallant D2	-	-	Kayu serbuk	2019	1.3.2.05.002.001.002	1	2.000,00	1	0	0	
8	Meja 1/2 Biro	ED2013	-	-	KAYU/SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	5.000,00	1	0	0	
9	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / -	-	-	BESI SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	2.500,00	1	0	0	MEJA ESELON III ##
10	Meja 1/2 Biro	- / -	-	-	KAYU SERBUK	2012	1.3.2.05.002.001.024	1	2.500,00	1	0	0	MEJA GODMA
11	Meja 1/2 Biro	Activ / -	-	-	KAYU SERBUK	2013	1.3.2.05.002.001.024	2	3.000,00	2	0	0	MEJA 1/2 BIRO
12	Kursi Rapat	CHITOSE	-	-	BESI BUSA	2011	1.3.2.05.002.001.030	3	1.485,00	3	0	0	KURSI BESI
13	Bangku Tunggu	Frontline / -	-	-	BESI	2013	1.3.2.05.002.001.035	1	2.500,00	1	0	0	KURSI TUNGGU 4 T4 DUDUK
14	Bangku Tunggu	Frontline / -	-	-	BESI	2013	1.3.2.05.002.001.035	3	6.300,00	3	0	0	KURSI TUNGGU
15	Bangku Tunggu	Acero / -	-	-	BESI	2013	1.3.2.05.002.001.035	3	7.500,00	3	0	0	
16	A.C. Window	Panasonic / -	SN :3425239611	-	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	8.000,00	1	0	0	
17	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	SN :6633376646	-	PLASTIK FIBER	2013	1.3.2.05.002.004.003	1	3.594,20	1	0	0	RUANG PBB P2 DAN BPHTB (KABID/STAP RUANG PBB-P2 (STAF)
18	A.C. Window	PANASONIC / 2 PK	S/N : 3736607111	-	FIBER	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	8.250,00	1	0	0	
19	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	S/N : 14065531911	-	MELAMIN	2017	1.3.2.05.002.004.003	1	4.400,00	1	0	0	
20	A.C. Window	PANASONIC / 1 PK	17291608687	-	PLASTIK	2019	1.3.2.05.002.004.003	1	5.300,00	1	0	0	AC (RUANG PBB-P2)
21	A.C. Split	Panasonic / Air Conditioner	SN. 340D4200701152601 32215	1 PK	FIBER	2021	1.3.2.05.002.004.004	1	5.500,00	1	0	0	AC Ruang PBB
22	Televisi	LG / 32"	SN :3101NXJ68649	-	FIBER	2013	1.3.2.05.002.006.002	1	3.500,00	1	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PER 31-Dec-2024

23	Dispenser	MIYAKO / WD 389			PLASTIK	2014	1.3.2.05.002.006.038	1	600,00	1	0	0	
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Siantano			Kayu Olympic	2019	1.3.2.05.003.006.005	4	5.000,00	4	0	0	Kursi Tamu 321 + Meja
25	Layar Film/Projector	LCD Proyektor/Infocus / -	-	-	FEBIR	2011	1.3.2.06.001.002.105	1	7.000,00	1	0	0	Proyektor
26	Camera Digital	Sony Cyber Shot / -	-	-	MELAMIN	2011	1.3.2.06.001.002.126	2	5.522,73	2	0	0	
27	Mainframe (Komputer Jaringan)	COMPAQ			FIBER	2012	1.3.2.10.001.001.001	1	27.500,00	1	0	0	
28	P.C Unit	-			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.001	1	12.250,00	1	0	0	
29	P.C Unit	Hp Compaq 800 Elite			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.001	1	12.250,00	1	0	0	
30	P.C Unit	HP LCD			FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.001	28	277.200,00	28	0	0	
31	P.C Unit	HP DL180G6 / -			PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.001.002.001	2	97.900,00	2	0	0	
32	Lap Top	Toshiba L 745			PLASTIK FEBER	2011	1.3.2.10.001.002.002	2	19.800,00	2	0	0	
33	Lap Top	Toshiba			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.002	1	21.850,00	1	0	0	
34	Lap Top	-			FIBER	2011	1.3.2.10.001.002.002	1	22.000,00	1	0	0	HP COMPAQ
35	Lap Top	TOSHIBA	80093228C		FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.002	1	9.000,00	1	0	0	
36	Lap Top	LENOVO	CB29130489		FIBER	2014	1.3.2.10.001.002.002	1	6.000,00	1	0	0	
37	Lap Top	LENOVO / Core I5	PF1GQYNZ		MELAMIN	2019	1.3.2.10.001.002.002	1	9.895,00	1	0	0	LAPTOP BIDANG PBB (Hj. Syamsiah)
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LX 300+II / -		-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	2	7.200,00	2	0	0	
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Samsung dp-320 n / -		-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	2	11.900,00	2	0	0	
40	Printsr (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 2190 / L 2190	-	-	PLASTIK FIBER	2012	1.3.2.10.002.003.003	1	18.600,00	1	0	0	
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360	* X3GW114927 *		FIBER	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	3.000,00	1	0	0	RUANG PBB-P2
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / In Effision G360	KMXVC6211		Plastik	2022	1.3.2.10.002.003.003	1	3.876,00	1	0	0	Printer Canon Pixma G360 in Effision Ruang PBB-P2
43	Peralatan Personal Komputer lainnya	APC			besi	2018	1.3.2.10.002.003.018	9	25.000,00	9	0	0	
44	Server	lenovo				2018	1.3.2.10.002.004.001	1	75.000,00	1	0	0	server lenovo
Jumlah Harga									784.532,93				

MENGETAHUI

KEPALA BPKPAD

PENGURUS BARANG

BENTENG SELAYAR, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab Ruangan

NURSAL IKHSAN, S.E, M.Ak, M.Si

NIP. 19830525 200604 1 016

ANDI ADHYATMA,S.E

NIP. 19900304 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Ctt	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	(%)	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Murni Tahun 2024
1.	Belanja Operasi		810.757.880.628,00	752.343.982.330,38	92,79	685.812.944.263,32	773.620.104.265,00
2.	Belanja Modal		170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,24	170.521.857.369,00	190.273.883.534,00
3.	Belanja Tidak Terduga		7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00	8.131.887.000,00
4.	Belanja Transfer		132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,48	133.334.346.956,00	130.351.130.440,00
Jumlah			1.121.539.457.234,00	968.690.723.677,38	87,42	989.673.418.368,32	1.102.377.005.239,00

Keterangan : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja

Benteng, 17 Maret 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Ctt	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	(%)	Realisasi Tahun 2023	Anggran Murni Tahun 2024
1.	Pendapatan						
	Asli Daerah (PAD)		109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46	79.717.225.613,42	95.000.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer		960.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,52	854.591.939.882,66	925.419.265.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00	7.500.000.000,00
Jumlah			1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59	92,82	945.693.874.944,08	1.027.919.265.000,00

Benteng, 17 Maret 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah



NURSAE IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016

Best West



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Uraian	Catt	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	(%)	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Murni Tahun 2024
1	SILPA		220.000.000,00	75.840.668.848,21	34,47	45.813.525.076,18	0
Jumlah			220.000.000,00	75.840.668.848,21	34,47	45.813.525.076,18	0

Keterangan : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja APBD sebelum perubahan

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau

- dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.102.377.005.239,00 (satu triliun seratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah Rp1.027.919.265.000,00
- b. belanja Daerah Rp1.102.377.005.239,00

(Defisit)/Surplus

(Rp74.457.740.239,00)

- c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan Rp75.457.740.239,00

2. pengeluaran Rp1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp74.457.740.239,00

siswa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 1.027.919.265.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.271.091.400,00 (delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.561.483.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.388.925.600,00 (enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp925.419.265.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.136.661.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.282.604.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.102.377.005.239,00 (satu triliun seratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp773.620.104.265,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta seratus empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp441.734.462.547,00 (empat ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp287.084.774.539,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.659.055.179,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.141.812.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp190.273.883.534,00 (seratus sembilan puluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.750.990.410,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.238.046.164,00 (seratus tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.048.596.960,00 (tujuh puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp236.250.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp8.131.887.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp130.351.130.440,00 (seratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.183.257.440,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.167.873.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp74.457.740.239,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp75.457.740.239,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp74.457.740.239,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp74.457.740.239,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

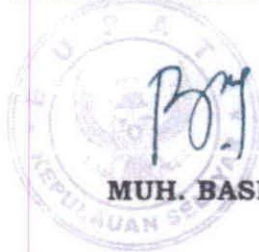
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 29 Desember 2023

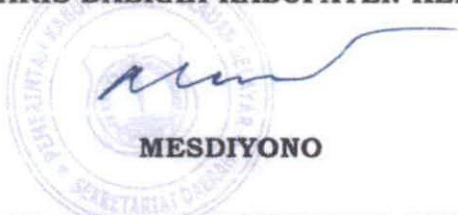
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 130**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.10.158.23**



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	18.271.091.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.561.483.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.388.925.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	925.419.265.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.136.661.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.282.604.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.027.919.265.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	773.620.104.265,00
5.1.01	Belanja Pegawai	441.734.462.547,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.084.774.539,00
5.1.05	Belanja Hibah	41.659.055.179,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.141.812.000,00
5.2	BELANJA MODAL	190.273.883.534,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.750.990.410,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.238.046.164,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.048.596.960,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236.250.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.131.887.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.131.887.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	130.351.130.440,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	128.167.873.000,00
	Jumlah Belanja	1.102.377.005.239,00
	Total Surplus/(Defisit)	-74.457.740.239,00

KODE	URAIAN		JUMLAH (Rp)
1	2		3
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		75.457.740.239,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		75.457.740.239,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto		74.457.740.239,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)		0,00

Kab. Kepulauan Selayar, 29 Desember 2023

Bupati



H. MUH. BASLI ALI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK UNIT PELAYANAN
DAPAT DIAKSES DI WEBSITE PEMDA**

No.	Unit Pelayanan	Anggaran	Realisasi	Alamat Portal/OPD
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.388.796.000	1.247.460.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	379.083.000	320.616.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	558.750.000	529.300.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	120.000.000	119.849.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	581.250.000	532.685.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	143.400.000	130.200.000	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.304.786.000	1.174.460.500	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.505.202.748	5.199.431.818	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	140.058.800	140.058.800	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
10.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.312.695.000	1.814.172.117	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.710.000	12.676.400	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
12.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.000.000	18.562.900	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/
13.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	39.000.000	32.538.569	https://kepulauanseyalar.kab.go.id/

14.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19.800.000	19.086.000	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
15.	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	196.960.000	196.955.000	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
16.	Pelayanan Informasi Publik	194.842.000	194.423.000	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
17.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	750.000.000	609.055.182	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
18.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	112.224.260	107.038.200	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
19.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	183.000.000	177.636.200	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
20.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.000.000	47.901.800	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
21.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.137.500	2.137.000	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
22.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.786.400	https://kepulauanelayar.kab.go.id/
TOTAL		17.029.695.308	12.631.029.686	

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21027 Fax. (0414) 21737

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) Tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Alamat Portal	Perangkat Daerah	Ket
1.	Ringkasan RKA SKPD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Ringkasan RKA PPKD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3.	Raperda APBD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4.	Perda APBD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5.	Raperda Perubahan APBD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
6.	Perda Perubahan APBD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
7.	Ringkasan DPA SKPD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
8.	Ringkasan DPA PPKD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
9.	LRA seluruh SKPD	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
11.	LKPD yang sudah di audit	https://kepulauanelayarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

12.	opini atas LKPD	https://kepulauanseyarkab.go.id/	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
-----	-----------------	---	--	--

Keterangan : lampirkan tangkapan layar/*screenshot website* tersebut

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016

Signed in | Semua Daftar File Download Halaman 1

https://kepulauanselayarkab.go.id/katdownload-radppk-1.html

PROFIL PPID IPKD DOWNLOAD AREA PENGUMUMAN BERITA GALLERI AGENDA WEBMAIL INDEX BERITA

DAFTAR / LIST FILE DOWNLOAD [Back to Homepage](#)

No	Nama File	Tgl Upload	Hits	Aksi
1	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2025	2025-01-21	7 Kali	Download
2	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024	2024-10-17	91 Kali	Download
3	Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2024	2024-10-17	94 Kali	Download
4	RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025	2024-10-03	109 Kali	Download
5	INFORMASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025	2024-10-03	222 Kali	Download
6	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023	2024-08-30	59 Kali	Download
7	INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	2024-08-29	59 Kali	Download
8	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD tahun 2023	2024-08-29	62 Kali	Download
9	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023	2024-08-29	59 Kali	Download
10	INFORMASI PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023	2024-08-24	67 Kali	Download
11	RESUME LHP	2024-08-22	69 Kali	Download
12	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2023	2024-07-30	129 Kali	Download
13	INFORMASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023	2024-07-10	97 Kali	Download
14	Daftar No. 14 Tahun 2023 tentang DPKD 2023	2024-07-09	234 Kali	Download

TEMUKAN JUGA KAMI DI

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [LinkedIn](#)

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, LinkedIn dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

BERITA TERBARU

 **Panitia Rapat Persiapan Jelang STQH XXXIV Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar** 0
12.19.16, 27 Jan 2025

 **Sekda Selayar Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Sejumlah PNS Puma Tugas Terima Penghargaan** 0
09.04.37, 17 Jan 2025

 **BPKPD Selayar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah** 0
23.25.33, 16 Jan 2025

Benteng, 17 Maret 2025

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**



NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19830525 200604 1 016



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59	92,82	945.693.874.944,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46	79.717.225.613,42
4.1.01	Pajak Daerah	28.271.091.400,00	13.600.326.209,00	48,11	14.270.867.976,30
4.1.01.06	Pajak Hotel	503.000.000,00	262.535.595,00	52,19	232.720.267,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	2.496.761.994,00	75,66	2.425.373.923,10
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.525.000,00	20.504.072,00	57,72	29.840.001,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	257.500.000,00	298.565.484,00	115,95	278.940.752,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.857.000.000,00	3.812.016.484,00	98,83	3.761.838.414,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	215.750.000,00	18.926.240,00	8,77	13.147.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.050.000.000,00	2.351.152.037,00	19,51	3.284.093.525,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.752.316.400,00	3.479.497.841,00	51,53	3.352.855.670,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.300.000.000,00	860.366.462,00	66,18	892.058.424,20
4.1.02	Retribusi Daerah	47.922.113.000,00	42.741.898.637,00	89,19	4.824.522.956,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	45.315.769.000,00	41.312.941.162,00	91,17	3.447.368.800,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.106.344.000,00	1.229.461.220,00	58,37	1.131.993.730,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	199.496.255,00	39,90	245.160.426,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95	12.115.146.704,74
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95	12.115.146.704,74
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.688.925.600,00	7.822.420.190,39	37,81	48.506.687.976,38
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.298.367.263,37	86,56	1.803.100.646,19
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	52.183.179,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	1.048.199.633,33	14,44	147.268.371,95
4.1.04.09	Penerimaan Kontribusi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.931.758.400,00	5.475.853.293,69	45,89	15.733.662.524,24
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	30.770.453.255,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46	79.717.225.613,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	960.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,53	854.591.939.882,66
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	889.551.149.000,00	877.066.913.025,00	98,60	802.727.311.424,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	800.364.105.000,00	790.279.278.025,00	98,74	734.481.618.424,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	800.364.105.000,00	790.279.278.025,00	98,74	734.481.618.424,00
4.2.01.05	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	96,46	68.245.693.000,00
4.2.01.06	Incentif Fiskal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	89.187.044.000,00	86.787.635.000,00	97,31	68.245.693.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.972.303.000,00	40.494.252.456,00	57,06	51.864.628.458,66
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.458.831.000,00	26.405.597.145,00	49,39	45.053.940.458,66
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.513.472.000,00	14.088.655.311,00	80,44	6.810.688.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	70.972.303.000,00	40.494.252.456,00	57,06	51.864.628.458,66
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	960.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,53	854.591.939.882,66
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59	92,82	945.693.874.944,08
5	BELANJA DAERAH	1.121.539.457.234,00	968.690.723.677,38	86,37	989.673.418.368,32
5.1	BELANJA OPERASI	810.757.880.628,00	752.343.982.230,38	92,80	685.812.944.262,32
5.1.01	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.912.746.226,76	94,65	372.087.952.604,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	298.708.508.119,00	290.748.776.725,00	97,34	267.517.181.471,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.442.853.160,00	105.444.415.998,00	88,28	84.622.472.648,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.393.286.546,00	15.062.392.365,76	91,88	9.015.294.362,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.785.077.100,00	9.740.335.305,00	99,54	10.189.364.644,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	418.635.460,00	230.002.965,00	54,94	232.759.479,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	483.160.000,00	94,57	510.880.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00	203.662.868,00	40,73	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.334.935.234,00	284.784.000.048,62	91,47	284.967.254.713,32
5.1.02.01	Belanja Barang	54.160.023.798,00	48.903.317.596,00	90,29	40.702.943.905,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	102.392.657.139,00	92.751.180.212,52	90,58	111.299.641.195,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.837.838.717,00	16.407.255.016,00	97,44	14.889.130.751,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.625.227.500,00	58.299.252.462,00	96,16	58.861.181.090,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa naruk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.671.439.500,00	8.057.672.071,00	75,49	6.813.054.969,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.177.554.580,00	20.680.593.721,00	97,65	22.290.220.500,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.468.194.000,00	39.684.728.970,10	87,28	30.111.072.303,32
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.384.757.889,00	43.397.402.055,00	93,56	26.150.268.446,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	596.560.000,00	99,43	0,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	200.000.000,00	189.950.600,00	94,98	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	38.833.884.222,00	36.033.386.012,00	92,79	25.496.857.917,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	978.700.000,00	975.196.000,00	99,64	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	669.133.667,00	669.129.393,00	100,00	653.410.529,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.103.040.000,00	4.933.180.050,00	96,67	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.278.947.000,00	2.249.834.000,00	98,72	2.607.468.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.269.947.000,00	2.240.834.000,00	98,72	2.538.968.500,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	68.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	810.757.880.628,00	752.343.982.330,38	92,80	685.812.944.263,32
5.2	BELANJA MODAL	170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,25	170.521.857.369,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	960.060.000,00	512.154.500,00	53,35	352.830.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	960.060.000,00	512.154.500,00	53,35	352.830.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.788.048.470,00	18.146.622.794,00	91,70	20.720.049.471,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	55.200.000,00	55.100.000,00	99,82	26.553.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.230.544.450,00	3.070.501.000,00	95,05	4.220.547.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	107.550.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	25.300.000,00	23.476.500,00	92,79	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.973.472.620,00	2.807.401.500,00	94,41	3.786.358.271,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	864.000.000,00	855.890.000,00	99,05	2.084.100.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	801.585.000,00	790.054.205,00	98,56	584.640.060,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.997.864.000,00	3.995.764.000,00	99,95	7.459.477.540,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.608.913.800,00	2.489.721.600,00	95,43	2.322.964.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	1.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	106.350.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.646.035.600,00	2.646.035.600,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.580.533.000,00	1.408.168.379,00	54,57	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.787.580.471,00	71.973.982.522,00	93,73	80.539.478.965,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.394.035.800,00	70.604.583.572,00	94,91	78.916.833.465,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Panti	374.863.500,00	360.483.950,00	96,16	1.622.645.500,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.018.681.171,00	1.008.915.000,00	49,98	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	72.691.554.225,00	54.397.846.811,00	74,83	68.627.953.933,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.645.241.937,00	36.656.982.453,00	68,33	49.667.518.441,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.392.976.287,00	11.650.623.882,00	94,01	16.378.970.007,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.319.710.000,00	2.304.850.000,00	99,36	162.850.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.333.626.001,00	3.785.410.476,00	87,35	2.418.615.485,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	62.910.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Berwujud Keselamatan/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	42.910.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99	218.635.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99	218.635.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,25	170.521.857.369,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.4	BELANJA TRANSFER	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49	133.334.346.956,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	1.641.045.485,00	75,17	1.702.109.807,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.827.109.140,00	1.372.705.813,00	75,13	1.415.145.097,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	356.148.300,00	268.339.672,00	75,34	286.964.710,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	48,04	131.632.237.149,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	48,04	131.632.237.149,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49	133.334.346.956,00
	JUMLAH BELANJA	1.121.539.457.134,00	968.690.723.677,38	86,37	989.473.418.368,32
	SURPLUS/DEFISIT	(45.593.525.234,00)	30.027.143.772,21	(65,86)	(43.979.543.424,24)
6	PEMBILAYAN DAERAH	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.717.404.829,42
6.1.01.05	Penghematan Belanja	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.717.404.829,42
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	PEMBLAYAAN NETTO	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
	SISA LEBIH PEMBLAYAAN ANGGARAN	220.000.000,00	75.840.668.848,21	34.473,03	45.813.525.076,18





PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN REALISASI PENGAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59		945.693.974.944,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46	79.717.225.613,42
	Pajak Daerah	28.271.091.400,00	13.600.326.209,00	48,11	14.270.667.976,30
	Pajak Hotel	503.000.000,00	262.535.595,00	52,19	232.720.267,00
	Pajak Hotel	503.000.000,00	262.535.595,00	52,19	232.720.267,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	503.000.000,00	262.535.595,00	52,19	232.720.267,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	2.496.761.994,00	75,66	2.425.373.923,10
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sengernya	3.300.000.000,00	2.496.761.994,00	75,66	2.425.373.923,10
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sengernya	3.300.000.000,00	2.496.761.994,00	75,66	2.425.373.923,10
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.525.000,00	20.504.072,00	57,72	19.840.001,00
4.1.01.08.02	Pajak Pengeluaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.525.000,00	20.504.072,00	57,72	19.840.001,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pengeluaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.525.000,00	20.504.072,00	57,72	19.840.001,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	257.500.000,00	298.565.484,00	115,95	278.940.752,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	257.500.000,00	298.565.484,00	115,95	278.940.752,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	257.500.000,00	298.565.484,00	115,95	278.940.752,00
4.1.01.10	Pajak Pencernaan Jalan	3.857.000.000,00	3.812.016.484,00	98,83	3.761.838.414,00
4.1.01.10.01	Pajak Pencernaan Jalan Dibersihkan Sendiri	3.857.000.000,00	3.812.016.484,00	98,83	3.761.838.414,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Pencernaan Jalan Dibersihkan Sendiri	3.857.000.000,00	3.812.016.484,00	98,83	3.761.838.414,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	215.750.000,00	18.926.240,00	8,77	13.147.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	215.750.000,00	18.926.240,00	8,77	13.147.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	215.750.000,00	18.926.240,00	8,77	13.147.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.050.000.000,00	2.351.152.037,00	19,51	3.284.093.525,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	12.050.000.000,00	2.351.152.037,00	19,51	3.284.093.525,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	12.050.000.000,00	2.351.152.037,00	19,51	3.284.093.525,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.752.316.400,00	3.479.497.841,00	51,53	3.352.855.670,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.752.316.400,00	3.479.497.841,00	51,53	3.352.855.670,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.752.316.400,00	3.479.497.841,00	51,53	3.352.855.670,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.300.000.000,00	860.366.462,00	66,18	892.058.434,20
4.1.01.16.02	BPHTB-Pembelian Hak Baru	1.300.000.000,00	860.366.462,00	66,18	892.058.434,20
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pembelian Hak Baru	1.300.000.000,00	860.366.462,00	66,18	892.058.434,20
4.1.02	Retribusi Daerah	47.922.113.000,00	42.741.898.637,00	89,19	4.834.322.956,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	45.315.768.000,00	41.312.941.162,00	91,17	3.447.368.800,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.410.630.000,00	40.472.756.662,00	91,13	2.674.168.300,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.360.630.000,00	9.548.411.591,00	66,49	2.635.100.800,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000.000,00	30.911.317.571,00	103,04	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sengens	50.000.000,00	13.027.500,00	26,06	19.667.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Pemasmban/ Keberban	515.000.000,00	491.527.500,00	95,44	464.292.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	161.657.000,00	44,84	154.480.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	161.657.000,00	44,84	154.480.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku	11.639.000,00	11.000.000,00	94,51	8.550.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku	11.639.000,00	11.000.000,00	94,51	8.550.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan TeraT on Umum	18.000.000,00	0,00	0,00	9.378.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Penlekapannya	18.000.000,00	0,00	0,00	9.378.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Telekomunikasi	0,00	176.000.000,00	0,00	136.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.106.344.220,00	1.229.461.220,00	58,37	1.131.993.730,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kelayan Daerah	346.000.000,00	249.082.000,00	71,99	252.222.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	77.000.000,00	54.034.000,00	70,17	68.744.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	75.000.000,00	101.000.000,00	134,67	93.970.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00	13.075.000,00	53,37	15.583.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kelayan Bermotor	119.500.000,00	41.300.000,00	34,56	44.550.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00	39.673.000,00	79,35	29.747.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perokan	500.000.000,00	354.003.700,00	70,80	226.774.800,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagi Jenis Barang yang Dikontrakkan	500.000.000,00	354.003.700,00	70,80	226.774.800,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelatngan	250.000.000,00	69.201.700,00	27,68	62.400.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	25.000.000,00	905.000,00	3,62	1.363.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	25.000.000,00	905.000,00	3,62	1.363.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00	905.000,00	3,62	1.363.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penghapuan/Penghapuan/Vila	265.000.000,00	22.920.000,00	8,65	40.830.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Tempat Penghapuan/Penghapuan/Vila	265.000.000,00	22.920.000,00	8,65	40.830.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kependidikan	650.000.000,00	533.348.820,00	82,05	532.445.930,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	533.348.820,00	82,05	532.445.930,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	199.496.255,00	39,90	245.160.426,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	245.160.426,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Penerimaan Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	245.160.426,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	199.496.255,00	39,90	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	199.496.255,00	39,90	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95	12.115.146.704,74
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95	12.115.146.704,74
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.005.751.676,20	94,84	12.115.146.704,74
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.005.751.676,20	94,84	12.115.146.704,74
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.688.925.600,00	7.822.420.190,39	37,81	48.506.687.976,38
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.298.367.263,37	86,56	1.803.100.646,19
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.298.367.263,37	86,56	1.803.100.646,19
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.298.367.263,37	86,56	1.803.100.646,19
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	52.183.179,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	52.183.179,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	52.183.179,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	1.048.199.633,33	14,44	147.288.371,95
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	1.048.199.633,33	14,44	147.288.371,95
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	1.048.199.633,33	14,44	147.288.371,95
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.931.758.400,00	5.475.853.293,69	45,89	15.733.662.524,24
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.931.758.400,00	5.475.853.293,69	45,89	15.733.662.524,24
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.931.758.400,00	5.475.853.293,69	45,89	15.733.662.524,24
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	30.770.453.255,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	30.770.453.255,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	30.770.453.255,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.660.630.000,00	76.170.396.712,59	69,46	79.717.216.613,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	969.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,53	854.591.939.882,66
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	889.551.149.000,00	877.066.913.025,00	98,60	802.727.311.424,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	800.364.105.000,00	790.379.278.025,00	98,74	734.481.618.424,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.375.649.000,00	15.401.372.000,00	100,17	18.290.090.317,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	711.196.000,00	711.196.000,00	100,00	1.431.192.799,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.403.788.000,00	4.403.788.000,00	100,00	5.371.713.899,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	256.881.000,00	282.604.000,00	110,01	295.018.202,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	385.555.000,00	385.555.000,00	100,00	291.662.523,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.177.316.000,00	2.177.316.000,00	100,00	2.449.659.947,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.388.000,00	6.388.000,00	100,00	16.798.736,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	7.434.525.000,00	7.434.525.000,00	100,00	8.433.044.211,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	620.900.520.000,00	620.495.260.651,00	99,93	584.338.059.271,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	609.295.834.000,00	471.682.602.000,00	77,41	565.526.667.271,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.204.636.000,00	9.799.426.651,00	96,03	17.413.392.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	67.648.489.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	33.375.369.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	36.589.374.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.244.896.000,00	42.731.502.855,00	96,58	31.419.707.650,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	579.889.000,00	572.216.950,00	98,68	571.362.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.939.319.000,00	3.405.158.200,00	68,94	4.310.467.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SNP	3.013.271.000,00	2.659.049.070,00	88,24	5.225.506.100,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	2.109.974.000,00	2.865.508.700,00	135,81	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusutan-Pemunutan AKI dan AKB	79.810.000,00	72.520.000,00	90,87	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.545.961.000,00	1.425.350.000,00	92,20	196.839.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.031.244.000,00	7.961.600.000,00	99,13	18.762.941.550,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.352.592.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penggiatan Sistem Kesehatan	23.945.428.000,00	23.740.099.925,00	99,14	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.843.040.000,00	111.651.142.519,00	93,16	100.433.761.186,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.192.950.000,00	20.190.395.551,00	95,27	22.231.520.504,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.733.795.000,00	55.733.795.000,00	100,00	51.505.043.740,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.243.853.000,00	1.243.853.000,00	100,00	924.187.678,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.681.234.000,00	10.681.234.000,00	100,00	8.168.783.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.802.940.000,00	759.524.160,00	27,10	847.125.200,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.803.580.000,00	795.000.000,00	19,86	796.880.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	698.449.100,00	99,78	675.680.746,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.510.410.000,00	17.993.058.898,00	92,22	13.836.838.318,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	263.401.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	417.770.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	628.117.000,00	473.072.800,00	75,32	395.794.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	634.138.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.972.760.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBAKANG	800.364.105.000,00	790.279.278.025,00	98,74	734.481.618.424,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.05	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	96,46	68.245.693.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	96,46	68.245.693.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	96,46	68.245.693.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	89.187.044.000,00	86.787.635.000,00	97,31	68.245.693.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.972.303.000,00	40.494.252.456,00	57,06	51.864.628.458,66
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.458.831.000,00	26.405.597.145,00	49,39	45.053.940.458,66
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.458.831.000,00	26.405.597.145,00	49,39	45.053.940.458,66
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.971.878.100,00	5.528.105.694,00	55,44	9.175.220.315,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.509.000.000,00	4.217.621.791,00	31,24	7.194.154.833,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.736.981.000,00	8.393.387.537,00	53,34	15.758.283.102,66
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.249.971.900,00	8.266.482.123,00	58,01	12.926.292.208,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.513.472.000,00	14.088.655.311,00	80,44	6.810.688.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.513.472.000,00	14.088.655.311,00	80,44	6.810.688.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.513.472.000,00	14.088.655.311,00	80,44	6.810.688.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	70.972.303.000,00	40.494.252.456,00	57,06	51.864.628.458,66
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	969.523.452.000,00	917.561.165.481,00	95,53	854.591.939.882,66
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAIH	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	0,00
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	11.384.709.448,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAIH	5.761.850.000,00	4.986.305.256,00	86,54	11.384.709.448,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.075.945.932.000,00	998.717.867.449,59	92,82	945.693.874.944,08
5	BELANJA DAERAH	1.121.539.457.334,00	968.690.723.677,38	86,37	989.673.418.368,31
5.1	BELANJA OPERASI	810.757.880.628,00	753.343.982.330,38	92,80	685.812.944.263,31
5.1.01	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.912.746.226,76	94,65	372.087.952.604,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	298.708.508.119,00	290.748.776.725,00	97,34	267.517.181.471,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	222.649.739.280,00	220.801.363.894,00	99,17	195.290.685.173,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	181.748.089.280,00	179.988.354.539,00	99,03	172.095.317.973,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.901.650.000,00	40.813.009.355,00	99,78	23.195.367.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.152.100.000,00	18.535.492.013,00	96,78	16.440.427.415,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.130.200.000,00	15.545.014.795,00	96,37	14.747.700.907,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.021.900.000,00	2.990.477.218,00	98,96	1.692.726.508,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.419.100.600,00	4.960.175.029,00	91,53	4.939.499.986,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.419.100.600,00	4.960.175.029,00	91,53	4.939.499.986,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.559.000.000,00	14.303.758.000,00	98,25	14.472.161.806,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.559.000.000,00	14.303.758.000,00	98,25	14.472.161.806,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.404.509.000,00	4.005.993.158,00	90,95	3.328.707.132,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.006.859.000,00	1.623.616.460,00	80,90	1.871.117.132,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.397.650.000,00	2.382.376.698,00	99,36	1.457.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.683.300.000,00	10.902.030.831,00	93,31	10.543.013.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.460.300.000,00	8.859.211.020,00	93,65	9.182.242.120,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.223.000.000,00	2.042.819.811,00	91,89	1.360.771.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.893.000.000,00	1.748.809.013,00	92,38	298.930.683,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.893.000.000,00	1.748.809.013,00	92,38	298.930.683,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.310.710,00	3.134.961,00	37,72	2.769.522,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.328.710,00	2.373.344,00	32,38	2.439.072,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	982.000,00	761.617,00	77,56	330.450,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.861.216.133,00	13.659.216.375,00	81,01	12.033.767.491,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.952.023.000,00	11.764.080.602,00	78,68	10.998.089.033,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.909.193.133,00	1.895.135.773,00	99,26	1.035.678.458,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	572.215.573,00	459.724.917,00	80,34	403.662.809,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	483.000.000,00	374.910.769,00	77,62	350.349.180,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.215.573,00	84.814.148,00	95,07	53.313.629,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.506.016.823,00	1.369.078.534,00	90,91	1.210.030.534,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.245.500.000,00	1.114.645.867,00	89,49	1.061.593.608,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	260.516.823,00	254.432.667,00	97,66	148.436.926,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	8.553.525.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	8.553.525.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.442.853.160,00	105.444.415.998,00	88,28	84.622.472.648,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bulan Kerja ASN	32.695.167.400,00	31.396.350.938,00	96,03	30.060.579.619,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bulan Kerja PNS	32.695.167.400,00	31.396.350.938,00	96,03	30.060.579.619,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Berugas ASN	456.000.000,00	446.229.812,00	97,86	99.533.771,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Berugas PNS	456.000.000,00	446.229.812,00	97,86	99.533.771,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.614.000.000,00	4.516.453.340,00	97,89	1.629.797.154,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.614.000.000,00	4.516.453.340,00	97,89	1.629.797.154,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	81.677.685.760,00	69.085.381.908,00	84,58	52.832.562.104,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	81.677.685.760,00	69.085.381.908,00	84,58	52.832.562.104,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.393.286.646,00	15.062.392.365,76	91,88	9.015.294.362,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	254.227.837,00	10.875.000,00	4,28	33.970.305,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	77.083.337,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.000.000,00	10.875.000,00	72,50	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Pencerangan Jalan	6.844.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.000.000,00	0,00	0,00	33.970.305,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	40.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.312.709,00	34.821.750,00	27,79	20.010.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	1.631.250,00	65,25	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.812.709,00	23.294.250,00	83,75	8.700.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyulatan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	25.000.000,00	9.896.250,00	39,59	11.310.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.503.237.400,00	5.006.187.481,76	90,97	2.515.080.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.503.237.400,00	5.006.187.481,76	90,97	2.515.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.435.508.700,00	9.975.508.134,00	95,59	6.427.684.057,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.283.148.700,00	9.839.604.134,00	95,59	6.308.064.057,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	86.360.000,00	69.904.000,00	80,94	40.120.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	79.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	75.000.000,00	35.000.000,00	46,67	18.550.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	75.000.000,00	35.000.000,00	46,67	18.550.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.785.077.100,00	9.740.335.305,00	99,54	10.189.364.644,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.135,00	559.335.000,00	99,61	559.965.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.135,00	559.335.000,00	99,61	559.965.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.584.400,00	38.507.700,00	99,54	38.400.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.584.400,00	38.507.700,00	99,54	38.400.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.902.160,00	58.877.460,00	99,96	58.153.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.902.160,00	58.877.460,00	99,96	58.153.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.198.865,00	47.911.500,00	99,40	47.974.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.198.865,00	47.911.500,00	99,40	47.974.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.257.000,00	811.035.750,00	99,60	811.949.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.257.000,00	811.035.750,00	99,60	811.949.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.615.100,00	58.129.050,00	74,89	77.647.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.615.100,00	58.129.050,00	74,89	77.647.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.607.150,00	9.241.575,00	73,30	12.606.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.607.150,00	9.241.575,00	73,30	12.606.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.883.700.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.883.700.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	472.500.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.565.230.476,00	1.552.125.270,00	99,16	2.801.168.234,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.499.468,00	48.275.766,00	99,54	56.412.682,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.465.504,00	1.149.876,00	78,46	1.151.388,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	3.449.628,00	99,54	3.454.164,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.511.800.000,00	1.499.250.000,00	99,17	2.740.150.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.176.900.000,00	4.175.262.000,00	99,96	3.419.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.176.900.000,00	4.175.262.000,00	99,96	3.419.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.141.814,00	224.910.000,00	99,90	6.300.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.141.814,00	224.910.000,00	99,90	6.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	418.635.480,00	230.002.965,00	54,94	232.759.479,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.500.000,00	54.600.000,00	91,76	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.500.000,00	54.600.000,00	91,76	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	6.636.000,00	94,80	6.636.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	6.636.000,00	94,80	6.636.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	98,28	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	98,28	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	6.083.280,00	86,90	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	6.083.280,00	86,90	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.850.452,00	53.133.945,00	95,14	53.173.936,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.850.452,00	53.133.945,00	95,14	53.173.936,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	1.840,00	3,81	1.840,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	1.840,00	3,81	1.840,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	5.469.120,00	78,13	5.469.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	5.469.120,00	78,13	5.469.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00	112.320,00	92,31	112.320,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	174.819.000,00	174.819.000,00	100,00	287.478.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.837.838.717,00	16.497.255.016,00	97,44	14.889.130.751,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.956.253.130,00	8.696.278.643,00	97,10	9.367.189.453,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	156.250.000,00	59.829.000,00	38,29	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	15.344.890,00	6.859.500,00	44,70	19.923.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Pompa	0,00	0,00	0,00	87.150.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.511.305.000,00	1.508.729.430,00	99,83	1.754.865.955,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.502.828.695,00	3.463.504.732,00	98,88	3.750.094.416,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.173.955.305,00	1.128.003.753,00	96,09	1.226.039.600,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.411.770.000,00	1.411.646.590,00	99,99	1.260.897.007,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	178.147.000,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.920.000,00	2.890.000,00	98,97	0,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	5.362.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	126.530.000,00	123.068.900,00	97,26	236.828.850,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	312.450.000,00	297.271.099,00	95,13	343.111.825,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sani	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	65.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	162.819.240,00	162.819.240,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	7.693.500,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	497.540.000,00	449.156.399,00	90,28	406.765.800,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.449.436.612,00	7.288.916.654,00	97,85	4.736.634.423,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.449.436.612,00	7.288.916.654,00	97,85	4.736.634.423,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	432.148.975,00	422.059.719,00	97,67	600.356.875,00
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	129.159.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	344.648.975,00	334.559.719,00	97,07	365.309.875,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	195.808.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.03.05.0035	Belanja Pemeliharaan Barang Berwujud Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercakr Kebudayaan-Alat Bercakr Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.625.227.500,00	58.299.252.462,00	96,16	58.861.181.090,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.604.797.500,00	58.278.873.462,00	96,16	58.861.181.090,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.364.367.500,00	56.342.413.462,00	96,54	49.522.961.599,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.969.080.000,00	1.682.840.000,00	85,46	1.491.558.417,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	257.850.000,00	249.120.000,00	96,61	4.107.279.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33	849.063.800,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	2.890.318.274,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.430.000,00	20.379.000,00	99,75	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa* Luar Negeri	20.430.000,00	20.379.000,00	99,75	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.673.439.500,00	8.057.672.071,00	75,49	6.813.064.969,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	483.056.500,00	414.529.500,00	85,81	1.021.370.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	421.556.500,00	354.529.500,00	84,10	671.320.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penghargaan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.500.000,00	0,00	0,00	70.150.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	284.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.190.383.000,00	7.643.142.571,00	75,00	5.791.694.969,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.100.683.000,00	7.553.892.571,00	74,79	5.736.644.969,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	89.700.000,00	89.250.000,00	99,50	55.050.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.177.554.580,00	20.680.593.721,00	97,65	22.290.220.500,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.177.554.580,00	20.680.593.721,00	97,65	22.290.220.500,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.177.554.580,00	20.680.593.721,00	97,65	22.290.220.500,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.468.194.000,00	39.684.728.970,10	87,28	30.111.072.303,32
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.468.194.000,00	39.684.728.970,10	87,28	30.111.072.303,32
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.468.194.000,00	39.684.728.970,10	87,28	30.111.072.303,32
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.384.757.889,00	43.397.402.055,00	93,56	26.150.268.445,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	596.560.000,00	99,43	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	596.560.000,00	99,43	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	596.560.000,00	99,43	0,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	200.000.000,00	189.950.600,00	94,98	0,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	200.000.000,00	189.950.600,00	94,98	0,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	200.000.000,00	189.950.600,00	94,98	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	38.833.884.222,00	36.033.386.012,00	92,79	25.496.857.917,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.610.200.884,00	31.441.190.074,00	99,47	12.032.332.460,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.179.553.434,00	31.153.303.424,00	99,92	10.490.990.124,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	430.647.450,00	287.886.650,00	66,85	1.484.660.705,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	137.300.000,00	135.960.000,00	99,02	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	113.900.000,00	108.474.000,00	95,24	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	854.000.000,00	855.800.000,00	99,05	2.084.100.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.000.000,00	10.800.000,00	98,18	869.900.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.000.000,00	10.800.000,00	98,18	579.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	290.400.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	22.650.000,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sani	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	800.000.000,00	792.000.000,00	99,00	1.191.550.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	800.000.000,00	792.000.000,00	99,00	1.191.550.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	801.585.000,00	790.054.205,00	98,56	584.649.060,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	181.585.000,00	174.368.600,00	96,03	40.897.500,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	181.585.000,00	174.368.600,00	96,03	15.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.897.500,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	620.000.000,00	615.685.605,00	99,30	543.751.560,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	620.000.000,00	615.685.605,00	99,30	543.751.560,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.997.864.000,00	3.995.764.000,00	99,95	7.459.477.540,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.997.864.000,00	3.995.764.000,00	99,95	6.546.805.040,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	179.750.000,00	179.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	179.750.000,00	179.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	179.750.000,00	179.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	539.165.000,00	539.165.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	968.000.000,00	966.130.000,00	99,81	3.588.330.000,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	179.750.000,00	179.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	1.128.927.500,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	1.771.699.000,00	1.771.469.000,00	99,99	1.829.547.540,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	912.672.500,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	912.672.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.608.913.800,00	2.489.721.600,00	95,43	2.322.964.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.062.900.000,00	1.991.461.500,00	96,54	1.728.121.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.062.900.000,00	1.991.461.500,00	96,54	1.720.121.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	546.013.800,00	498.260.100,00	91,25	594.843.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	546.013.800,00	498.260.100,00	91,25	594.843.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	1.500.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	1.500.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	1.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	106.350.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	106.350.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersyarat	0,00	0,00	0,00	106.350.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.646.035.600,00	2.646.035.600,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.646.035.600,00	2.646.035.600,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.646.035.600,00	2.646.035.600,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.580.533.000,00	1.408.168.379,00	54,57	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.580.533.000,00	1.408.168.379,00	54,57	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.580.533.000,00	1.408.168.379,00	54,57	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.787.580.471,00	71.973.982.522,00	93,73	80.539.478.965,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.394.035.800,00	70.604.583.572,00	94,91	78.916.833.465,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	74.394.035.800,00	70.604.583.572,00	94,91	78.916.833.465,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.190.789.150,00	27.418.538.717,00	97,26	52.833.073.234,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Keselamatan	117.100.000,00	117.100.000,00	100,00	502.350.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.026.100.000,00	748.078.450,00	72,91	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Portaman	0,00	0,00	0,00	294.057.100,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.774.475.650,00	42.039.437.405,00	93,89	23.273.716.323,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.994.000,00	5.977.000,00	99,72	310.887.500,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	91.100.000,00	91.100.000,00	100,00	137.520.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	78.472.000,00	78.472.000,00	100,00	445.265.908,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	51.220.000,00	51.220.000,00	100,00	502.217.400,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	192.062.500,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Publik	0,00	0,00	0,00	78.126.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	54.660.000,00	54.660.000,00	100,00	347.557.500,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Triuk Kontrol/Pasti	374.863.500,00	360.483.950,00	96,16	1.622.645.500,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	374.863.500,00	360.483.950,00	96,16	1.622.645.500,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	374.863.500,00	360.483.950,00	96,16	1.622.645.500,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.018.681.171,00	1.008.915.000,00	49,98	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.018.681.171,00	1.008.915.000,00	49,98	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.018.681.171,00	1.008.915.000,00	49,98	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.691.554.225,00	54.397.846.811,00	74,83	68.627.953.933,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.645.241.937,00	36.656.962.453,00	68,33	49.667.518.441,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.679.348.887,00	33.897.480.277,00	69,63	47.274.085.791,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.170.835.611,00	28.392.685.203,00	66,93	37.760.797.685,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	4.503.180.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	5.342.708.326,00	4.839.197.624,00	90,58	4.118.613.606,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	165.804.950,00	165.597.450,00	99,87	891.494.500,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.965.893.050,00	2.759.482.176,00	55,57	2.393.432.650,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.637.789.650,00	2.440.926.976,00	52,63	1.074.802.500,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyubangan	328.103.400,00	318.555.200,00	97,09	1.315.795.150,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.392.976.287,00	11.650.623.882,00	94,01	16.378.970.007,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.125.707.000,00	1.036.844.660,00	92,11	1.127.168.903,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.125.707.000,00	1.036.844.660,00	92,11	1.127.168.903,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.591.081.737,00	5.175.574.042,00	92,57	7.315.943.555,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.337.316.820,00	1.218.696.220,00	91,12	1.062.647.450,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	4.253.764.917,00	3.956.967.822,00	93,02	6.253.296.105,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	743.765.000,00	724.855.000,00	97,46	311.092.000,00
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	743.765.000,00	724.855.000,00	97,46	311.092.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.932.422.550,00	4.713.350.180,00	95,56	7.624.765.549,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	8.797.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.932.422.550,00	4.713.350.180,00	95,56	7.615.968.549,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.319.710.000,00	2.304.850.000,00	99,36	162.850.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	959.710.000,00	946.500.000,00	98,62	0,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	941.710.000,00	928.500.000,00	98,60	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.360.000.000,00	1.358.350.000,00	99,88	152.850.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.360.000.000,00	1.358.350.000,00	99,88	152.850.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.333.626.001,00	3.785.410.476,00	87,35	2.418.615.485,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.135.626.001,00	3.587.430.476,00	86,74	2.055.615.485,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.135.626.001,00	3.587.430.476,00	86,74	2.055.615.485,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	198.000.000,00	197.980.000,00	99,99	363.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	198.000.000,00	197.980.000,00	99,99	363.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	62.910.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercekat	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	336.000.000,00	334.572.950,00	99,58	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Otahraga	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	42.910.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	42.910.000,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	42.910.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99	218.635.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99	218.635.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	243.910.000,00	241.440.000,00	98,99	218.635.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	43.910.000,00	43.910.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000,00	197.530.000,00	98,77	218.635.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	170.807.153.166,00	145.606.619.567,00	85,25	170.521.857.369,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	88,11	4.269.780,00
5.4	BELANJA TRANSFER	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49	133.334.346.956,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	1.641.045.485,00	75,17	1.702.109.807,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.827.109.140,00	1.372.705.813,00	75,13	1.415.145.097,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.827.109.140,00	1.372.705.813,00	75,13	1.415.145.097,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.827.109.140,00	1.372.705.813,00	75,13	1.415.145.097,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	356.148.300,00	268.339.672,00	75,34	286.964.710,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	356.148.300,00	268.339.672,00	75,34	286.964.710,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	356.148.300,00	268.339.672,00	75,34	286.964.710,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	48,04	131.632.237.149,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	48,04	131.632.237.149,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	131.632.237.149,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	67.830.496.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	62.721.891.000,00	62.720.689.995,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	132.735.644.440,00	64.361.735.480,00	48,49	133.334.346.956,00
	JUMLAH BELANJA	1.121.539.457.234,00	968.699.723.677,38	86,37	989.673.418.368,32
	SURPLUS/DEFISIT	(45.593.525.234,00)	30.027.143.772,21	(65,86)	(43.979.541.424,24)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	69.793.068.500,42

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.717.404.829,42
6.1.01.05	Penghematan Belanja	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.717.404.829,42
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	10.775.584.474,00	10.775.584.316,00	100,00	12.901.389.597,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.627.427.650,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	4.775.584.474,00	4.775.584.316,00	100,00	6.273.961.947,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	35.037.940.760,00	35.037.940.760,00	100,00	76.816.015.232,42
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	4.955.519.177,00	4.955.519.177,00	100,00	86.766.015.232,42
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	28.224.277.493,00	28.224.277.493,00	100,00	9.439.535.000,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	1.858.144.090,00	1.858.144.090,00	100,00	610.465.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.663.671,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
	PEMBIAYAAN NETTO	45.813.525.234,00	45.813.525.076,00	100,00	89.793.068.500,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	220.000.000,00	75.840.668.848,21	34.473,03	45.813.525.076,18



Kab. Kepulauan Selat Panjang, 17 Maret 2025
 Di. Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH

MURSAL IKHSAN, SE., M.Ak., M.Si
 NIP.19830522006041016